

RSUD AM PARIKESIT

LKjIP TAHUN 2021



RSUD A.M. Parikesit



@rsuparikesit



@rsamp.id



RSUD A M. PARIKESIT

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)**

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2021**



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT
Jalan Ratu Agung No.1 Tenggarong Seberang
Kutai Kartanegara – Kalimantan Timur
Telp. 0541-661015



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aji Muhammad Parikesit berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*good governance*). Oleh karena itu, manajemen pemerintahan yang perlu diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja setidaknya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis suatu organisasi sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur dan dapat diujikan diandalkan.

Berdasarkan saran dan arahan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Suatu indikator kinerja tidak selalu menjelaskan keadaan secara keseluruhan, tetapi kerap kali hanya memberi petunjuk (indikasi) tentang keadaan secara keseluruhan tersebut sebagai suatu perkiraan. Dapat dikatakan indikator bukanlah ukuran yang tetap, melainkan indikasi dari keadaan yang disepakati bersama oleh anggota organisasi yang akan dijadikan sebagai alat ukur.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKjIP ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) RSUD AM Parikesit Tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut:

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2021		PERSEN TASE
				TARGET	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kinerja dan Akuntabilitas Perangkat Daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Skor	BB (71)	A (80,32)	113,13 %
		Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/ Inspektorat pada tahun berjalan maka Wajib untuk ditindak lanjuti paling lambat 60 hari kerja	Persen	100 %	100 %	100 %
		Persentase Identifikasi, Inventarisasi Aset dalam Penelusuran	Persen	100 %	100 %	100 %
		Pengamanan Bidang Tanah	Jumlah	4	4	100 %





NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2021		PERSEN TASE
				TARGET	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Persentase ketepatan Input Rencana Umum Pengadaan pada Aplikasi SiRUP (Maksimal 7 hari kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Maksimal 14 hari kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2022)	Persen	100 %	50 %	50 %
		Tingkat Kepatuhan serta kelengkapan LHKPN pertanggal 31 Maret 2021	Persen	100 %	100 %	100 %
		Tingkat Kepatuhan LHKASN pertanggal 31 Maret 2021	Persen	100 %	100 %	100 %
		Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Skor/ Nilai	Baik (B) 60 – 70	28,4	47,33 %
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Capaian Penilaian Pelayanan Publik (Kemenpan RB)	Nilai	Pelayanan Prima (4,75)	Pelayanan Prima (4,69)	98,74 %
3	Tercapainya Standar Mutu Rumah Sakit	Persentase Indikator SPM yang Mencapai Target	Persen	85 %	75,76 %	89,13 %
		Peringkat Penilaian Akreditasi	Nilai rata-rata Penilaian Akreditasi	Paripurna (87)	Paripurna (83,51)	95,99 %
4.	Meningkatnya Ketersediaan Rumusan Alternatif Kebijakan Daerah Berbasis Data dan Informasi sesuai dengan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan rumusan alternatif kebijakan yang strategis dan insidental dalam bentuk dokumen telaahan staf	Persen	100 %	2.800 %	2.800 %
5.	Menurunnya Angka Kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara	Persentase Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan Program dan Kegiatan Berbasis pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	Persen	100 %	100 %	100 %



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya berkat rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Tahun 2021 dapat diselesaikan. Penyusunan LKjIP RSUD AM Parikesit Tahun 2021 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara keseluruhan LKjIP tahun 2021 merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD sesuai Renstra Perubahan tahun 2016-2021 telah dilaksanakan dengan baik. Meskipun demikian, kami menyadari masih terdapat kekurangan-kekurangan yang perlu dibenahi dan ditingkatkan di masa yang akan datang, sehingga kita dapat mewujudkan visi, misi, dan sasaran yang ingin dicapai melalui program dan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan Renstra Perubahan RSUD AM Parikesit. Hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel, serta menciptakan **Good Governance** dan **Clean Government**.



Pada akhirnya laporan ini kiranya dapat memberi manfaat yang optimal bagi peningkatan kinerja dimasa mendatang dan memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi khususnya RSUD AM Parikesit. Semoga LKjIP RSUD AM Parikesit ini juga dapat berguna sebagaimana mestinya.

Tenggarong Seberang, Februari 2022
Plt. Direktur RSUD AM Parikesit,



MARTINA YULIANTI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710712 200012 2 002





DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum	3
C. Struktur Organisasi	7
D. Tugas Pokok dan Fungsi	8
E. Tata Nilai dan Moto.....	9
F. Sumber Daya Manusia	10
G. Sarana dan Prasarana.....	12
1. Gedung	12
2. Kapasitas Tempat Tidur (TT).....	13
3. Peralatan.....	14
4. Sumber Daya Air dan Listrik	14
H. Keuangan	15
I. Isu-Isu Strategis.....	15
J. Sistematika Laporan Kinerja	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA.....	16
A. Perencanaan	16
1. Visi dan Misi Kepala Daerah	16
2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	18
3. Strategi dan Arah Kebijakan	19
4. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	19
B. Perjanjian Kinerja.....	20
C. Alokasi Anggaran Tahun 2021.....	21
D. Inovasi Pendukung	23
1. Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM RS).....	23
2. Sistem Informasi Kepegawaian (MySimpeg)	24
3. Sistem Informasi Penilaian Indikator Kinerja Individu (SilKI).....	24





4.	Sistem Pendaftaran Rujukan Rawat Jalan Online (SIPULAN)	25
5.	Daftar Visite Dokter Spesialis (Darvidos)	25
6.	Saluran Pengaduan Kita untuk Parikesit (SPEAKup).....	26
7.	Hotline Maternal Si Pengawal Ibu ke Rumah Sakit (HotMa Si Penyair) ...	26
8.	Wisma Transit	27
9.	Sistem Pengolah Data RBA BLUD (SiARBA)	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....		29
A.	Capaian Kinerja	29
B.	Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	31
1.	Meningkatnya Kinerja dan Akuntabilitas Perangkat Daerah.....	31
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	39
3.	Tercapainya Standar Mutu Rumah Sakit	42
4.	Meningkatnya Ketersediaan Rumusan Alternatif Kebijakan Daerah Berbasis Data dan Informasi sesuai dengan Fungsi Perangkat Daerah ..	44
5.	Menurunnya Angka Kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara	47
C.	Realisasi Penggunaan Anggaran.....	48
D.	Capaian dan Efisiensi Pencapaian Sasaran Strategis	49
BAB IV PENUTUP		52
LAMPIRAN		54





DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Jumlah Sumber Daya Manusia RSUD AM Parikesit Tahun 2021	10
Tabel 1.2.	SDM RSUD AM Parikesit berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	10
Tabel 1.3.	SDM RSUD AM Parikesit berdasarkan profesi	11
Tabel 1.4.	Luas Bangunan/Gedung RSUD AM Parikesit.....	13
Tabel 1.5.	Jumlah Kapasitas Tempat Tidur RSUD AM Parikesit Tahun 2021	13
Tabel 2.1.	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021	17
Tabel 2.2.	Tujuan dan Sasaran RSUD AM Parikesit Tahun 2016-2021	18
Tabel 2.3.	Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RSUD AM Parikesit	19
Tabel 2.4.	Keterkaitan Sasaran dengan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2021	20
Tabel 2.5.	Perjanjian Kinerja Tahun 2021	21
Tabel 2.6.	Alokasi Anggaran RSUD AM Parikesit Tahun 2021	21
Tabel 2.7.	Alokasi Anggaran Belanja RSUD AM Parikesit Tahun 2021	22
Tabel 2.8.	Alokasi Anggaran per Sasaran Tahun 2021	22
Tabel 2.9.	Alokasi Anggaran per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	23
Tabel 3.1.	Skala Nilai Peringkat Kinerja	29
Tabel 3.2.	Capaian Kinerja RSUD AM Parikesit Tahun 2021	29
Tabel 3.3.	Pengukuran Kinerja dengan indikator predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah.....	31
Tabel 3.4.	Capaian indikator predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah Tahun 2021	31
Tabel 3.5.	Capaian indikator kinerja predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah.....	32
Tabel 3.6.	Perbandingan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2020 dengan Instansi Lain di Kab. Kutai Kartanegara.....	33
Tabel 3.7.	Rumusan Indikator Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/Inspektorat pada Tahun berjalan maka Wajib untuk ditindak lanjuti paling lambat 60 hari kerja	33
Tabel 3.8.	Capain Indikator Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/Inspektorat pada Tahun berjalan maka Wajib untuk ditindak lanjuti paling lambat 60 hari kerja	33
Tabel 3.9.	Rumusan Indikator Persentase Identifikasi, Inventarisasi Aset dalam Penelusuran	34
Tabel 3.10.	Capaian Indikator Persentase Identifikasi, Inventarisasi Aset dalam Penelusuran	34





Tabel 3.11. Data Tanah RSUD AM Parikesit.....	34
Tabel 3.12. Capaian kinerja pengamanan bidang tanah	35
Tabel 3.13. Capaian indikator kinerja ketepatan Input Rencana Umum Pengadaan pada Aplikasi SiRUP	36
Tabel 3.14. Capaian Indikator Tingkat Kepatuhan serta kelengkapan LHKPN pertanggal 31 Maret 2021	36
Tabel 3.15. Capaian Indikator Tingkat Kepatuhan serta kelengkapan LHKASN pertanggal 31 Maret 2021	37
Tabel 3.16. Rumusan dan Capaian Indikator Kinerja Predikat Tata Kelola Arsip RSUD AM Parikesit Tahun 2021	38
Tabel 3.17. Rumusan Indikator Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	40
Tabel 3.18.Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik per Tahun	40
Tabel 3.19. Rumusan Indikator Sasaran Tercapainya Standar Mutu Rumah Sakit.....	42
Tabel 3.20. Target dan Realisasi Sasaran Tercapainya Standar Mutu Rumah Sakit.....	42
Tabel 3.21. Rumusan dan Capaian Meningkatnya ketersediaan rumusan alternatif kebijakan daerah berbasis data dan informasi sesuai dengan fungsi perangkat daerah	46
Tabel 3.22. Rumusan dan Capaian Sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara	47
Tabel 3.23. Rincian Belanja Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2021	48
Tabel 3.24. Uraian Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RSUD AM Parikesit Tahun 2021	49
Tabel 3.25. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2021	50
Tabel 3.26. Tingkat Efisiensi Sasaran per program	51





DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Struktur Organisasi RSUD AM Parikesit.....	7
Gambar 1.2.	Persentase Sumber Daya Manusia RSUD AM Parikesit Tahun 2021	10
Gambar 1.3.	Persentase Tingkat Pendidikan SDM RSUD AM Parikesit Tahun 2021	11
Gambar 1.4.	SDM RSUD AM Parikesit berdasarkan Profesi	11
Gambar 2.1.	Persentase Alokasi Anggaran Belanja RSUD AM Parikesit Tahun 2021	22
Gambar 2.2.	Tampilan Depan MySimpeg	24
Gambar 2.3.	Tampilan SilKI.....	24
Gambar 2.4.	SIPULAN	25
Gambar 2.5.	Tampilan SPEAKUp	26
Gambar 2.6.	Informasi HotMa Si Penyair.....	27
Gambar 2.7.	Wisma Transit RSUD AM Parikesit	27
Gambar 2.8.	SiARBA.....	28
Gambar 3.1.	Perbandingan Target dan Capaian Indikator Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dari Tahun 2017 - 2021 ..	32
Gambar 3.2.	Tingkat capaian indikator kinerja antara target dan capaian	34
Gambar 3.3.	Capaian kinerja pengamanan bidang tanah	35
Gambar 3.4.	Target dan Capaian persentase ketepatan input rencana umum ..	36
Gambar 3.5.	Perbandingan Target dan Capaian Indikator Tingkat Kepatuhan serta kelengkapan LHKPN pertanggal 31 Maret 2021.....	37
Gambar 3.6.	Perbandingan Target dan Capaian Indikator Tingkat Kepatuhan serta kelengkapan LHKASN pertanggal 31 Maret 2021	37
Gambar 3.7.	Target dan Capaian Tata Kelola Arsip RSUD AM Parikesit Tahun 2021	38
Gambar 3.8.	Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	40
Gambar 3.9.	Perbandingan Target dan Realisasi Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dari Tahun 2017-2021.....	40
Gambar 3.10.	Target dan Realisasi Sasaran Tercapainya Standar Mutu Rumah Sakit	42
Gambar 3.11.	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Indikator SPM yang mencapai target dari tahun 2017-2021	43
Gambar 3.12.	Target dan Realisasi Indikator Peringkat Penilaian Akreditasi dari tahun 2017-2021	43





DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Perjanjian Kinerja 2021	55
Lampiran 2.	Pengukuran Kinerja 2021	56
Lampiran 3.	Indikator Kinerja Individu Direktur RSUD AM Parikesit.....	57
Lampiran 4.	Pohon Kinerja Tahun 2021.....	58
Lampiran 5.	Rencana Aksi Tahun 2021	59
Lampiran 6.	Publikasi SAKIP pada aplikasi E-Sakip Kemenpan RB	59
Lampiran 7.	Hasil Evaluasi AKIP RSUD AM Parikesit Tahun 2020	60
Lampiran 8.	Tingkat Kepatuhan LHKPN RSUD AM Parikesit Tahun 2021.....	62
Lampiran 9.	Sertifikat Akreditasi RSUD AM Parikesit Tahun 2019-2022.....	62
Lampiran 10.	Hasil Nilai dan Piagam Pelayanan Publik dari Kemenpan RB	63
Lampiran 11.	Hasil Standar Pelayanan Minimal dari Tahun 2018-2021	64
Lampiran 12.	Evaluasi Kinerja Fisik dan Keuangan Triwulan Pertama Tahun 2021	67
Lampiran 13.	Evaluasi Kinerja Fisik dan Keuangan Triwulan Kedua Tahun 2021	67
Lampiran 14.	Evaluasi Kinerja Fisik dan Keuangan Triwulan Ketiga Tahun 2021	68
Lampiran 15.	Evaluasi Kinerja Fisik dan Keuangan Triwulan Keempat Tahun 2021	68
Lampiran 16.	Evaluasi Kinerja Fisik dan Keuangan berdasarkan Aplikasi E-Pantau Bappeda Triwulan Pertama Tahun 2021	69
Lampiran 17.	Evaluasi Kinerja Fisik dan Keuangan berdasarkan Aplikasi E-Pantau Bappeda Triwulan Kedua Tahun 2021	70
Lampiran 18.	Evaluasi Kinerja Fisik dan Keuangan berdasarkan Aplikasi E-Pantau Bappeda Triwulan Ketiga Tahun 2021	71
Lampiran 19.	Evaluasi Kinerja Fisik dan Keuangan berdasarkan Aplikasi E-Pantau Bappeda Triwulan Keempat Tahun 2021	72



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang-Undang (UU) Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelegaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN mengamanatkan hal tersebut sebagai penegasan dari Tap MPR No.XI/MPR/1998 yang dalam implementasinya dipertegas dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pemerintahan Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah sesuai dengan UU No. 32 tahun 2004 termasuk sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Presiden No. 29 tahun 2014 berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*), dan mempertanggung jawabkannya melalui media SAKIP.

Untuk memenuhi maksud tersebut, maka Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara menyusun Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 sebagai bentuk komitmen rumah sakit dalam pelaksanaan pembangunan dibidang kesehatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Dokumen LKjIP RSUD AM Parikesit Tahun 2021 ini disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan RSUD AM Parikesit Tahun 2016-2021 serta berdasarkan Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



LKjIP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LKjIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Dan kesemua hal tersebut memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh masyarakat.

Bertitik tolak dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara dan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara beserta organisasi perangkat daerahnya diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP RSUD AM Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

LKjIP RSUD Kabupaten Kutai Kartanegara ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.





9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
12. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal RSUD AM Parikesit.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah RSUD AM Parikesit Tahun 2021 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh RSUD AM Parikesit.
2. Mendorong RSUD AM Parikesit di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundungan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi RSUD Parikesit untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap RSUD AM Parikesit di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

B. Gambaran Umum



Awal berdirinya, RSUD AM Parikesit merupakan balai pengobatan milik Kerajaan Kutai. Ketika itu, didirikan dengan maksud untuk melayani kebutuhan pelayanan kesehatan di kalangan istana serta menyajikan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma kepada masyarakat Kutai pada umumnya. Pada masa itu, balai pengobatan berlokasi di jalan Pattimura atau lebih dikenal oleh



masyarakat yaitu Gunung Pendidik Tenggarong. Pada zaman Belanda kemudian diberi nama Parikesit Hospital yang diambil dari nama Raja Kutai yang memerintah pada Tahun 1920-1960. Setelah kemerdekaan, rumah sakit milik kerajaan tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai oleh Raja Kutai yang bertahta saat itu.

Dalam perkembangannya, rumah sakit dipindahkan ke jalan Mayjen Panjaitan Tenggarong di samping Toraga Barat. Namun dengan berkembangnya pembangunan di Kabupaten Kutai, rumah sakit dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat. Akhirnya, pada tanggal 12 November 1983, rumah sakit baru dengan sarana prasarana yang jauh lebih memadai di jalan Imam Bonjol diresmikan oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, H. Soewandi. Rumah sakit tersebut diberi nama RSU AM Parikesit yang diambil dari nama raja Kutai Sultan Aji Muhammad Parikesit. Ketika itu, RSU AM Parikesit merupakan satu-satunya rumah sakit yang ada di wilayah Kabupaten Kutai.



Secara bertahap, RSU AM Parikesit pada tahun 2004 berubah menjadi Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum AM Parikesit sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 dan kelas rumah sakit yang tadinya tipe D meningkat menjadi tipe C. Selanjutnya pada tahun 2009 RSUD AM Parikesit berkembang lagi menjadi tipe B.



Sejak saat itu, jumlah pasien semakin bertambah seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. Menyadari bahwa fasilitas rumah sakit yang berkapasitas 200 tempat tidur di jalan Imam Bonjol tidak memadai lagi untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara membangun gedung baru di kecamatan Tenggarong Seberang dengan kapasitas 400 tempat tidur.



Pada tanggal 28 Desember 2015 RSUD AM Parikesit berpindah dari Jalan Imam Bonjol Tenggarong ke Jalan Ratu Agung No.1 Tenggarong Seberang. Sesuai dengan keputusan Kepala Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur Surat Ijin Operasional Rumah Sakit Nomor: 503/439/SK/BPPMD-PTSP/III/2016 yang menetapkan Pemberian ijin tetap Penyelenggara Operasional kepada RSUD AM Parikesit yang di perpanjang mulai tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan 09 Maret 2021.



RSUD AM Parikesit merupakan Rumah Sakit kelas B Non Pendidikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1222/Menkes/SK/XII/2009 dan merupakan Rumah Sakit Rujukan Regional Kalimantan Timur. RSUD AM Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan - Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) yang tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 180.188/HK-57/2009 tanggal 10 Februari 2009 tentang Penerapan PPK-BLUD secara bertahap pada RSUD AM Parikesit dan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 256/SK-BUP/HK/2014 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD Aji Muhammad Parikesit status PENUH.

Berbagai Fasilitas sudah dilengkapi untuk bisa memberikan pelayanan yang optimal dengan 369 jumlah tempat tidur, salah satunya telah beroperasinya *Parikesit Mother Care*, pelayanan *One Stop Service*, dan Rumah Transit yang diperuntukkan bagi keluarga pasien dari luar kota Tenggarong sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal. Adanya dukungan Sumber Daya Manusia yang berkompeten dan profesional serta ditunjang fasilitas sarana dan prasarana yang memadai sehingga dapat memberikan pelayanan yang paripurna kepada masyarakat. RSUD AM Parikesit





mendapatkan predikat sebagai Unit kerja Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) pada tahun 2016. Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi Pemerintah terhadap integritas dan komitmen yang kuat setiap Instansi Pemerintah untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik dalam hal mendukung Pemberantas Korupsi di instansi pemerintahan.



Selain itu, RSUD AM Parikesit kembali meraih predikat Pelayanan Prima dari Kemenpan-RB secara berturut-turut dari tahun 2016 hingga tahun 2019, sehingga penghargaan ini merupakan penghargaan keempat kali dari Kemenpan-RB dan merupakan satu-satunya Organisasi Perangkat Daerah yang berhasil mempertahankan predikat Pelayanan

Prima selama empat tahun berturut-turut. Penghargaan ini merupakan apresiasi dari Kemenpan RB dalam Kepatuhan Standar Pelayanan Publik menurut UU Nomor 25 Tahun 2009.

Berdasarkan hasil penilaian dari lembaga independen Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) dan Kementerian Kesehatan RI sebagai Rumah Sakit yang telah memenuhi Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi Pertama (SNARS Edisi I) dengan nilai rerata 83,51 dan dinyatakan Lulus Tingkat Paripurna Nomor : KARS-SERT/1279/XII/2019 yang berlaku sampai dengan 24 November 2022.





C. Struktur Organisasi



Gambar 1. 1. Struktur Organisasi RSUD AM Parikesit

Struktur Organisasi diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja pada RSUD AM Parikesit merupakan unsur pelaksana teknis pelayanan kesehatan yang dipimpin oleh seorang Direktur yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya Direktur, dibantu oleh 2 (dua) Wakil Direktur yaitu:

1. Wakil Direktur Pelayanan yang dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Bidang, yaitu :
 - Bidang Pelayanan Medis
 - Seksi Pelayanan Medis Rawat Inap
 - Seksi Pelayanan Medis Non Rawat Inap
 - Bidang Keperawatan
 - Seksi Keperawatan Rawat Inap
 - Seksi Keperawatan Non Rawat Inap
 - Bidang Penunjang
 - Seksi Penunjang Medik
 - Seksi Penunjang Non Medik





2. Wakil Direktur Umum dan Keuangan yang dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Bagian, yaitu:
 - Bagian Umum
 - Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga
 - Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha
 - Sub Bagian Hukum dan Humas
 - Bagian Keuangan
 - Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran
 - Sub Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana
 - Sub Bagian Akutansi dan Verifikasi
 - Bagian Pengembangan
 - Sub Bagian Pengembangan RS dan Pemasaran
 - Sub Bagian Diklat dan Kerjasama
 - Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

D. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas Pokok

RSUD AM Parikesit memiliki tugas pokok sesuai dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit pasal 4, dimana rumah sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 89 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural pada Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara Pasal 3, RSUD Aji Muhammad Parikesit mempunyai tugas pokok meliputi:

- a) Membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan pelayanan kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya pelayanan rujukan;
- b) Melaksanakan pelayanan yang bermutu berdasarkan standar pelayanan rumah sakit.

2. Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 89 Tahun 2012 pasal 4, RSUD AM Parikesit berfungsi:





- a) Menyelenggarakan pelayanan medis dan asuhan keperawatan;
- b) Menyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan non medis;
- c) Menyelenggarakan pengelolaan sumber daya manusia rumah sakit;
- d) Menyelenggarakan pelayanan rujukan;
- e) Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- f) Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan;
- g) Menyelenggarakan penyuluhan kesehatan masyarakat rumah sakit.

E. Tata Nilai dan Moto

1. Tata Nilai



a) Visioner

Kemampuan untuk melihat jauh kedepan dan merumuskan langkah yang tepat untuk mencapainya.

b) Inovatif

Kemampuan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk menghasilkan gagasan dan solusi diluar bingkai konservatif.

c) Profesional

Memiliki kemampuan yang tinggi dan berpegang teguh pada nilai moral dalam pekerjaannya.

d) Ramah

Kesediaan untuk melayani dengan sopan, santun, dan beretiket.

e) Sigap

Melayani dengan tangkas, cepat, dan penuh semangat.

f) Empati

Mampu merasakan keadaan emosional pelanggan dan berusaha menyelesaiakannya.

2. Moto

RSUD AM Parikesit memiliki moto "**Parikesit Pilihan Terbaik**".

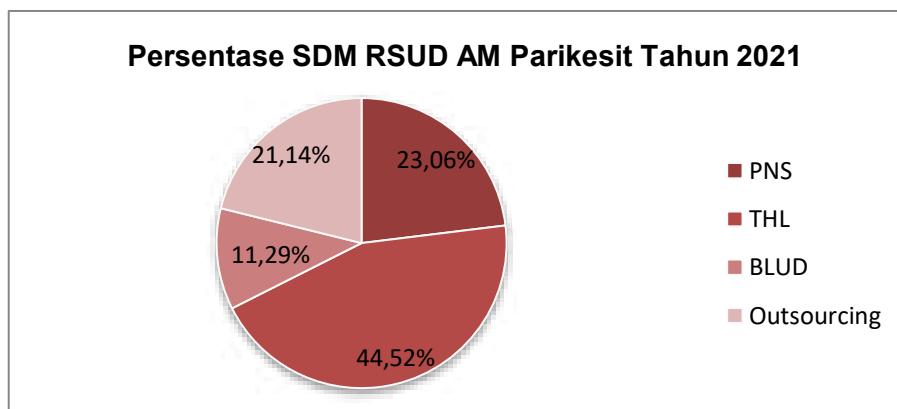


F. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi RSUD AM Parikesit diperlukan SDM yang kompeten dan berkualitas. Kondisi SDM di RSUD AM Parikesit sampai dengan 31 Desember 2021, tercatat sebanyak 1.248 orang, meliputi 287 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 556 orang Non Pegawai Negeri Sipil (THL), 141 orang Tenaga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), 264 orang tenaga Outsourcing (pihak ketiga). Dijelaskan dalam tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1. 1. Jumlah Sumber Daya Manusia RSUD AM Parikesit Tahun 2021

No.	Status Pegawai	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	288
2.	Tenaga Harian Lepas (THL)	556
3.	Tenaga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	141
4.	Outsourcing (Pihak Ketiga)	264
Jumlah		1249

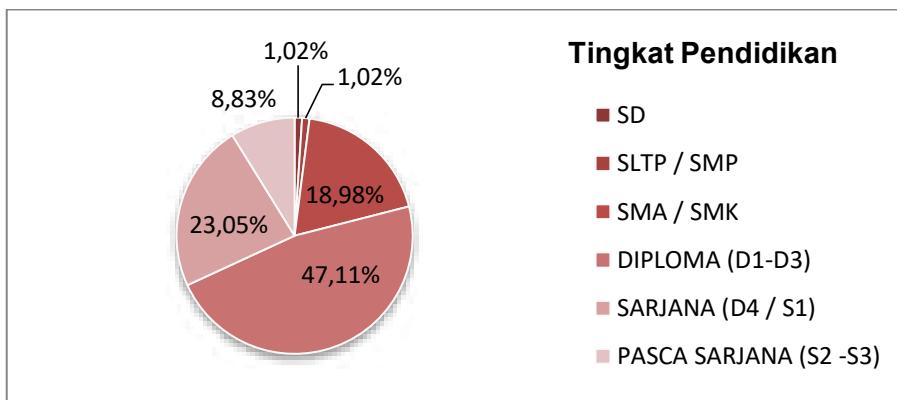


Gambar 1. 2. Persentase Sumber Daya Manusia RSUD AM Parikesit Tahun 2021

Berdasarkan tingkat pendidikan, SDM yang dimiliki RSUD AM Parikesit terperinci pada tabel 1.2 berikut ini:

Tabel 1. 2. SDM RSUD AM Parikesit berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1	SD	10
2	SLTP/SMP	10
3	SMA/SMK	187
4	DIPLOMA (D1 - D3)	464
5	SARJANA (D4 / S1)	227
6	PASCA SARJANA (S2 & S3)	87
TOTAL		985

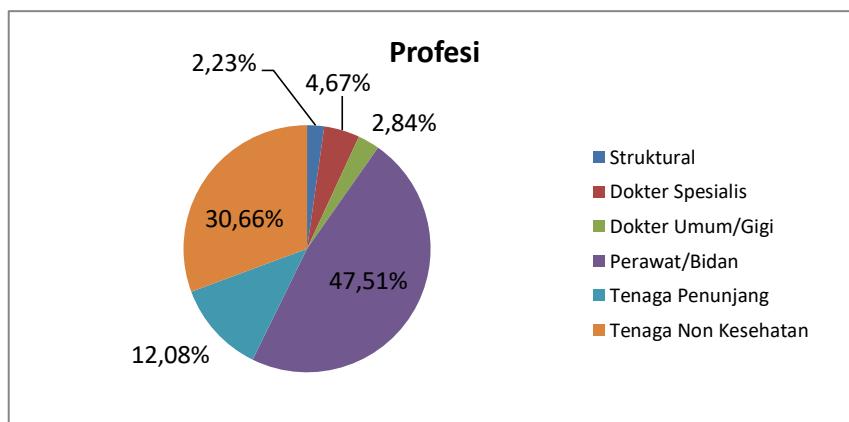


Gambar 1. 3. Persentase Tingkat Pendidikan SDM RSUD AM Parikesit Tahun 2021

Berdasarkan profesi, SDM RSUD AM Parikesit yang bekerja dibagian struktural berjumlah 22 orang. Lalu yang berprofesi sebagai dokter spesialis sebanyak orang dan sebagai dokter umum dan gigi sebanyak orang serta yang berprofesi sebagai perawat dan bidan sebanyak orang. Sedangkan SDM yang berprofesi di bagian pendukung atau penunjang sebanyak orang dan SDM Non Kesehatan sebanyak orang.

Tabel 1. 3. SDM RSUD AM Parikesit berdasarkan profesi

No.	Profesi	Jumlah
1	Struktural	22
2	Dokter Spesialis	46
3	Dokter Umum/Gigi	28
4	Perawat/Bidan	468
5	Penunjang	119
6.	Non Kesehatan	302
Total		985



Gambar 1. 4. SDM RSUD AM Parikesit berdasarkan Profesi

G. Sarana dan Prasarana

1. Gedung

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sarana dan prasarana RSUD AM Parikesit harus sesuai dengan persyaratan dan ketentuan berlaku yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. RSUD AM Parikesit memiliki luas lahan seluas 4 hektare yang diatasnya berdiri 8 (delapan) gedung yang menurut penamaan dan kegunaannya sebagai berikut:



- a) Gedung Merak (A) digunakan untuk Poliklinik dan Auditorium
- b) Gedung Garuda (B) digunakan untuk perkantoran administrasi dan manajerial.
- c) Gedung Elang (C) digunakan untuk instalasi Rawat Darurat, Instalasi Rawat Inap II, Instalasi Rawat Intensif dan Instalasi Bedah Sentral.
- d) Gedung Rajawali (D) digunakan untuk penunjang medis seperti Instalasi Radiologi, Instalasi Laboratorium, Unit Hemodialisa, Depo Rawat Inap, Unit Admisi dan Layanan Pengaduan, dan Kasir Rawat Inap.
- e) Gedung Punai (E) digunakan untuk Instalasi Rawat Inap, Instalasi Rehabilitasi Medik dan GCU.
- f) Gedung Enggang (F) digunakan untuk Instalasi Rawat Inap.
- g) Gedung Penunjang Medik dan Non Medik yang terdiri dari Instalasi Laundry, Instalasi Gizi, Instalasi Farmasi, dan Gudang ATK.
- h) Gedung I digunakan untuk Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit, Unit Kesehatan Lingkungan dan Tempat Generator Set.
- i) Gedung Wisma Transit digunakan untuk istirahat atau penunggu pasien yang berasal dari luar Kota Tenggarong
- j) Gedung Instalasi Farmasi digunakan sebagai Gudang Obat-obatan Instalasi Farmasi.



Rincian luas bangunan pada masing-masing gedung RSUD AM Parikesit sebagaimana pada tabel 1.4 berikut ini:

Tabel 1. 4. Luas Bangunan/Gedung RSUD AM Parikesit

No.	Gedung	Luas (m ²)
1.	Gedung Merak (A)	1127
2.	Gedung Garuda (B)	720
3.	Gedung Elang (C)	1906
4.	Gedung Rajawali (D)	1134
5.	Gedung Punai (E)	1611
6.	Gedung Enggang (F)	1503
7.	Gedung Laundry, Gizi, Farmasi	385
8.	Gedung IPS RS (I)	518
9	Gedung Wisma Transit	320
10	Gudang Farmasi	576

2. Kapasitas Tempat Tidur (TT)

Kapasitas tempat tidur di RSUD AM Parikesit pada tahun 2021 sebanyak 354 tempat tidur (TT) yang tersebar di 11 ruang perawatan dengan rincian pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1. 5. Jumlah Kapasitas Tempat Tidur RSUD AM Parikesit Tahun 2021

No.	Jenis/ Kelas Perawatan	Jumlah (TT)	Persentase (%)
1	VIP	10	2,82
2	Utama	10	2,82
3	Kelas I	33	9,32
4	Kelas II	81	22,88
5	Kelas III	147	41,53
6	Isolasi	18	5,08
7	ICU	12	3,39
8	PICU / NICU	6	1,69
9	Rawat Inap Covid	20	5,65
10	ICU Covid	15	4,24
11	PICU / NICU Covid	2	0,56
Jumlah		354	100 %





3. Peralatan

Peralatan sebagai pendukung pelayanan RSUD AM Parikesit terdiri dari peralatan medis maupun non medis. Peralatan diperoleh dari APBD Kabupaten Kutai Kartanegara, APBD Provinsi Kalimantan Timur dalam bentuk Bantuan Keuangan (Bankeu) dan APBD melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Beberapa peralatan medis tersebut diantaranya:

- ✓ X-Ray Mobile yang berfungsi untuk mendiagnosa penyakit pada organ tubuh bagian dalam dengan bantuan sinar-x dengan pembangkit tegangan tinggi yang pengisian muatannya menggunakan kondensator, sehingga X-Ray ini bisa digunakan secara mobile atau bisa dibawa kemana-mana.
- ✓ Cathlab yaitu suatu alat yang digunakan sebagai tindakan medis/prosedur diagnostik invasif yang berfungsi untuk mendeteksi penyempitan atau sumbatan pembuluh darah jantung/koroner.
- ✓ Laparoscopy digunakan sebagai alat penunjang medis ahli bedah untuk mengakses bagian dalam rongga perut dan panggul.
- ✓ Transcranial Doppler (TCD) digunakan sebagai alat penunjang medis dalam membantu tindakan pemeriksaan minim risiko (non invasif) yang menggunakan gelombang ultrasound untuk mengukur aliran darah di dalam otak.
- ✓ Echo Cardiography, alat ini digunakan untuk mengukur kecepatan dan arah aliran darah yang dibantu oleh teknologi Doppler. Cara kerja alat ini menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi untuk menangkap gambar struktur organ jantung.

Namun demikian, peralatan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan peralatan sesuai dengan standar rumah sakit kelas B, Untuk itu masih perlu adanya pengembangan dan penambahan peralatan baik medis maupun non medis secara berkesinambungan.

4. Sumber Daya Air dan Listrik

Air bersih RSUD AM Parikesit bersumber dari PDAM Tirta Mahakam Kabupaten Kutai Kartanegara. Rumah sakit memiliki bak penampungan dengan kapasitas $191.000 \text{ m}^3 \times 2$ serta tambahan cadangan 20.000 liter yang tersimpan dalam 10 (sepuluh) tandon yang masing-masing bisa menampung 2.000 liter air.





Sumber daya listrik yang digunakan RSUD AM Parikesit bersumber dari PLN berupa 2 (dua) buah gardu dengan masing-masing gardu berkapasitas 1 MVA sistem tegangan 380 V dan dua buah generator set dengan kapasitas masing-masing 1.260 KVA.

H. Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi RSUD AM Parikesit pada Tahun 2021 berasal dari APBD Pemerintah Daerah, APBN (DAK) serta Dana Badan Layanan Umum (BLU).

Pada Tahun Anggaran 2021 RSUD AM Parikesit mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 344.669.779.556,00 yang diperuntukkan untuk belanja langsung dan belanja tak langsung serta untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program pendukung dengan rincian 2 (dua) program, 4 (empat) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan.

I. Isu-Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal.

Isu strategis yang melingkupi RSUD AM Parikesit, yaitu: Tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan kualitas pelayanan publik semakin tinggi.

J. Sistematika Laporan Kinerja

Ikhtisar Eksekutif

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab IV Penutup

Lampiran



BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan

Rencana Strategis (Renstra) RSUD AM Parikesit merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang didalamnya menjabarkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan serta sub kegiatan pembangunan pada RSUD AM Parikesit yang disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit. Dalam penyusunan perencanaan di RSUD AM Parikesit disesuaikan berdasarkan situasi dan perkembangan di masyarakat. Dengan adanya perkembangan IPTEK yang semakin maju maka masyarakat dituntut untuk bisa menyesuaikan sesuai dengan perkembangan.

Renstra RSUD AM Parikesit Tahun 2016-2021 disusun berdasarkan dengan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021. Sebelumnya, RSUD AM Parikesit melakukan koordinasi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan dalam penyusunannya.

Dengan ditetapkan Permendagri No. 86 Tahun 2017, RSUD AM Parikesit melakukan evaluasi terhadap Renstra Tahun 2016 – 2021 sehingga RSUD AM Parikesit menyusun Renstra Perubahan Tahun 2016-2021. Renstra perubahan ini disusun dengan tahapan-tahapan berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tersebut.

Renstra perubahan ini didasarkan pada hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana strategis yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 serta adanya penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah, sebagai acuan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara yang dituangkan dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 adalah “Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan.”



Dalam rangka mewujudkan tema visi tersebut, Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara menyampaikan misi sebagai berikut:

- a. Memantapkan reformasi birokrasi untuk rakyat;
- b. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkompeten;
- c. Meningkatkan pembiayaan pembangunan daerah;
- d. Meningkatkan pengelolaan pertanian dan pariwisata untuk percepatan transformasi struktur ekonomi daerah;
- e. Meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur menuju daya saing daerah;
- f. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- g. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan serta penguatan perlindungan anak.

Selanjutnya visi misi tersebut dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam bagan alir Cascade RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021. Dalam hal ini RSUD AM Parikesit mengampu **Misi pertama** dan **Misi kedua** yang terlihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021

Visi : “Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan.”					
No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1.	Memantapkan Reformasi Birokrasi untuk Rakyat (Misi 1)	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas dan Melayani	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	Predikat Akuntabilitas Kinerja
2.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkompeten (Misi 2)	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Berakhhlak Mulia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup

Berangkat dari Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas dan pokok fungsinya, RSUD AM Parikesit berupaya mendukung pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah yaitu: Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan dengan indikator Predikat Akuntabilitas Kinerja dan Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dengan indikator Angka Harapan Hidup.

2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

a. Tujuan

Mengacu pada Sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan, maka Tujuan yang relevan dengan tugas dan fungsi RSUD AM Parikesit adalah Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan dan Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.

b. Sasaran

Berdasarkan pada Tujuan yang telah ditetapkan oleh RSUD AM Parikesit, maka Sasaran yang hendak dicapai terlihat pada tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2. 2. Tujuan dan Sasaran RSUD AM Parikesit Tahun 2016-2021

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahunan					Target Akhir Renstra
						2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	Predikat Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas perangkat daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kategori (Skor)	C (46,32)	B (61)	B (63)	B (65)	BB (71)	BB (71)
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Capaian Penilaian Pelayanan Publik (kategori versi kemenpan RB)	Kategori (nilai)	Pelayanan Prima (4,65)	Pelayanan Prima (4,70)	Pelayanan Prima (4,72)	Pelayanan Prima (4,74)	Pelayanan Prima (4,75)	Pelayanan Prima (4,75)
			Tercapainya Standar Mutu Rumah Sakit	Persentase Indikator SPM yang Mencapai Target	Persen	70,70	75	80	82,50	85	85
				Peringkat Penilaian Akreditasi	Nilai	Paripurna (86,33)	Paripurna (86,33)	Paripurna (87)	Paripurna (87)	Paripurna (87)	Paripurna (87)

3. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan rangkaian langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan perangkat daerah. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Arah kebijakan perangkat daerah merupakan keputusan dari *stakeholder* sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun.

Adapun strategi dan arah kebijakan RSUD AM Parikesit Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2. 3. Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RSUD AM Parikesit

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	Meningkatnya Kinerja dan Akuntabilitas Perangkat Daerah	Peningkatan Fungsi Tata Kelola	Meningkatkan Tata Kelola Administrasi
			Meningkatkan Tata Kelola Sumber Daya Manusia
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Pemenuhan Aspek Pelayanan Publik	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
	Tercapainya Standar Mutu Rumah Sakit	Peningkatan Pencegahan Penyakit	Meningkatkan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Bagi Aparatur
		Peningkatan Kualitas Pelayanan di Rumah Sakit	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Rumah Sakit
			Meningkatkan Pengembangan Layanan Rumah Sakit

4. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian sasaran pada Tahun 2021, sebagaimana tercantum pada tabel 2.4 berikut ini:

Tabel 2. 4. Keterkaitan Sasaran dengan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1		2	3	4
Meningkatnya Kinerja dan Akuntabilitas Perangkat Daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Capaian Penilaian Pelayanan Publik (kategori versi kemenpan RB)	Pemenuhan Usaha Kesehatan Perorangan dan Usaha Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Percentase Indikator SPM yang Mencapai Target		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Tercapainya Standar Mutu Rumah Sakit	Peringkat Penilaian Akreditasi		Operasional Pelayanan Rumah Sakit	

B. Perjanjian Kinerja

Dokumen perjanjian kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, tanggung jawab, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra Perubahan Tahun 2016-2021, Rencana Kerja Tahunan (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Perjanjian kinerja RSUD AM Parikesit Tahun 2021 sebagaimana terlihat pada tabel 2.5 berikut:



Tabel 2. 5. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kinerja dan Akuntabilitas Perangkat Daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Skor	BB (71)
		Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/ Inspektorat pada tahun berjalan maka Wajib untuk ditindak lanjuti paling lambat 60 hari kerja	Persen	100 %
		Persentase Identifikasi, Inventarisasi Aset dalam Penelusuran	Persen	100
		Pengamanan Bidang Tanah	Jumlah	4
		Persentase ketepatan Input Rencana Umum Pengadaan pada Aplikasi SiRUP (Maksimal 7 hari kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Maksimal 14 hari kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2022)	Persen	100 %
		Tingkat Kepatuhan serta kelengkapan LHKPN pertanggal 31 Maret 2021	Persen	100 %
		Tingkat Kepatuhan LHKASN pertanggal 31 Maret 2021	Persen	100 %
		Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Skor/ Nilai	Baik (B) 60 – 70
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Capaian Penilaian Pelayanan Publik (Kemenpan RB)	Nilai	Pelayanan Prima (4,75)
3	Tercapainya Standar Mutu Rumah Sakit	Persentase Indikator SPM yang Mencapai Target	Persen	85 %
		Peringkat Penilaian Akreditasi	Nilai rata-rata Penilaian Akreditasi	Paripurna (87)
4.	Meningkatnya Ketersediaan Rumusan Alternatif Kebijakan Daerah Berbasis Data dan Informasi sesuai dengan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan rumusan alternatif kebijakan yang strategis dan insidental dalam bentuk dokumen telaahan staf	Persen	100 %
5.	Menurunnya Angka Kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara	Persentase Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan Program dan Kegiatan Berbasis pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	Persen	100 %

C. Alokasi Anggaran Tahun 2021

Pada tahun Anggaran 2021, RSUD AM Parikesit melaksanakan kegiatan yang bersumber dari APBD, APBD (DAK) dan BLUD sebesar Rp. 276.801.049.377,00 Melalui mekanisme perubahan APBD Tahun 2021 yang bersumber dari APBD, APBD (DAK), dan BLUD meningkat sebesar Rp. 344.669.779.556,00.

Tabel 2. 6. Alokasi Anggaran RSUD AM Parikesit Tahun 2021

Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
Alokasi Anggaran	Rp. 276.801.049.377	Rp. 344.669.779.556	Rp. 67.868.730.179



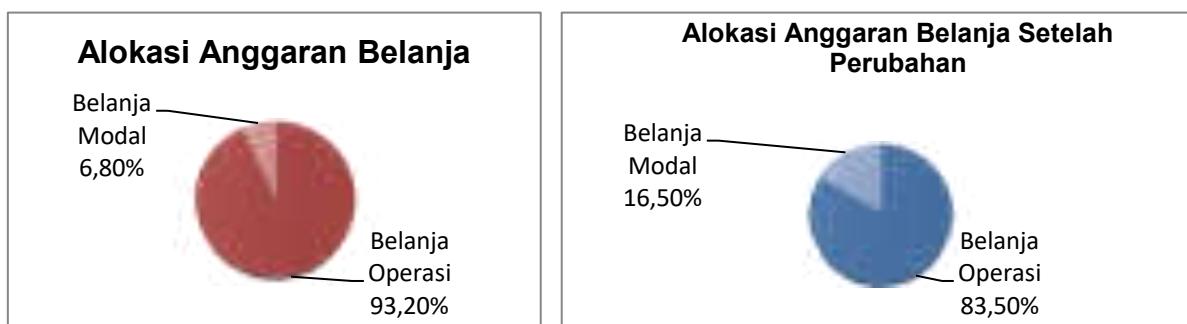


1. Alokasi Anggaran Belanja

Perencanaan pelaksanaan anggaran belanja dan setelah perubahan anggaran belanja RSUD AM Parikesit Tahun 2021 dengan rincian pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 7. Alokasi Anggaran Belanja RSUD AM Parikesit Tahun 2021

Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
Belanja Operasi	257.968.945.262,00	287.795.043.368,00	29.826.098.106,00
Belanja Modal	18.832.104.115,00	56.874.736.188,00	38.042.632.073,00
Total	276.801.049.377,00	344.669.779.556,00	67.868.730.179,00



Gambar 2. 1. Persentase Alokasi Anggaran Belanja RSUD AM Parikesit Tahun 2021

2. Alokasi Anggaran per Sasaran

Perencanaan pelaksanaan anggaran Tahun 2021, RSUD AM Parikesit mengalokasikan anggaran berdasarkan per sasaran (IKU) sebagaimana pada tabel 2.8 berikut ini:

Tabel 2. 8. Alokasi Anggaran per Sasaran Tahun 2021

No.	Sasaran	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Persentase
1.	Meningkatnya Kinerja dan Akuntabilitas Perangkat Daerah	60.926.355.454,00	65.536.620.106,00	7,57
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			
3.	Tercapainya Standar Mutu Rumah Sakit	215.874.693.923,00	279.133.159.450,00	29,30
Jumlah		276.801.049.377,00	344.669.779.556,00	24,52

3. Alokasi Anggaran per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

RSUD AM Parikesit Tahun 2021 merencanakan 2 (dua) program, 4 (empat) kegiatan, dan 5 (lima) sub kegiatan dengan rincian pada tabel 2.9 berikut ini:





Tabel 2. 9. Alokasi Anggaran per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No.	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	60.926.355.454,00	65.536.620.106,00
I.	<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	34.985.863.477,00	39.546.128.129,00
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	34.853.938.997,00	39.414.203.649,00
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	131.924.480,00	131.924.480,00
II	<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	25.940.491.977,00	25.990.491.977,00
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	25.940.491.977,00	25.990.491.977,00
B	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	215.874.693.923,00	279.133.159.450,00
III	<i>Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	2.982.802.403,00	35.144.290.579,00
4.	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.982.802.403,00	35.144.290.579,00
IV	<i>Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	212.891.891.520,00	243.988.868.871,00
5.	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	212.891.891.520,00	243.988.868.871,00
Jumlah		276.801.049.377,00	344.669.779.556,00

D. Inovasi Pendukung

Paradigma pembangunan yang terus berkembang dan adanya keterbatasan menjadi tantangan Pemerintah dalam pembangunan, hal tersebut menuntut RSUD AM Parikesit selalu melakukan langkah-langkah strategis berupa inovasi-inovasi dalam melaksanakan pembangunan supaya layanan RSUD AM Parikesit kepada masyarakat menjadi maksimal. Komitmen RSUD AM Parikesit yang tinggi ditunjukkan dengan membangun inovasi-inovasi dalam bentuk kebijakan maupun teknis operasional.

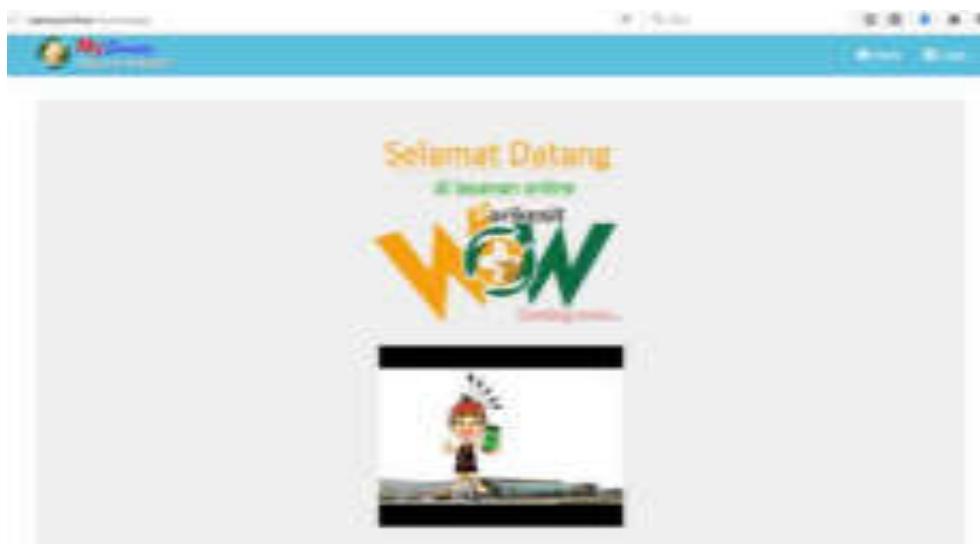
1. Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM RS)

SIM RS berfungsi sebagai sistem pendukung pelayanan kesehatan di RSUD AM Parikesit. SIM RS dikembangkan untuk menunjang pelaksanaan pelayanan kesehatan agar proses pelayanan menjadi lebih terintegrasi, transparan, akuntabel, dan cepat. Keberadaan SIM RS sampai saat ini mampu mendukung sistem pelayanan kesehatan di RSUD AM Parikesit.



2. Sistem Informasi Kepegawaian (MySimpeg)

MySIMPEG dengan alamat <http://rsamp.online/mysimpeg/> merupakan sistem pendukung yang memberikan informasi data-data pegawai diantaranya profil, diklat yang diikuti, riwayat pekerjaan selama di rumah sakit, rapor karyawan, riwayat cuti dan izin, dan sebagainya.



Gambar 2. 2. Tampilan Depan MySimpeg

3. Sistem Informasi Penilaian Indikator Kinerja Individu (SiIKI)

SiIKI dengan alamat akses <http://rsamp.online/siiki/> merupakan sistem informasi yang dikembangkan untuk mempermudah atasan/pejabat dalam menilai dan melaporkan kinerja staf/karyawan yang dibawahnya sehingga penilaian dapat lebih mudah dilakukan secara cepat, transparan dan akuntabel serta mempermudah dalam melakukan pembayaran jasa pelayanan/ remunerasi karyawan rumah sakit.



Gambar 2. 3. Tampilan SiIKI

4. Sistem Pendaftaran Rujukan Rawat Jalan Online (SIPULAN)

Sebuah sistem berbasis teknologi informasi dalam pendaftaran pasien rawat jalan yang dilakukan secara online di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang terintegrasi pada Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM RS) sehingga memudahkan bagi masyarakat/pasien untuk menentukan sendiri waktu untuk datang berobat, memperkirakan waktu tempuh untuk berobat, bisa mendaftar dari luar RS (FKTP) tanpa harus datang mengantri di loket pendaftaran dan mempersingkat waktu tunggu.



Gambar 2. 4. SIPULAN

Dengan SIPULAN diharapkan masyarakat/pasien mendapatkan keuntungan : (1) Menunggu di ruang tunggu dengan nyaman, lengang, dan sejuk; (2) Lebih leluasa menentukan waktu untuk datang berobat; (3) mendaftar dari luar RS (FKTP) tanpa harus datang mengantri di loket pendaftaran; (4) memperkirakan waktu tempuh ke Rumah Sakit; (5) dapat menentukan jadwal berkunjung berdasarkan dokter spesialis yang bertugas di poliklinik; (6) tidak dibedakan berdasarkan jaminan kesehatan; (7) waktu tunggu berobat di rawat jalan dipersingkat; (8) terjadinya perubahan pola pikir dan pola budaya melayani oleh karyawan RSUD AM Parikesit

5. Daftar Visite Dokter Spesialis (Darvidos)

Merupakan sebuah inovasi yang digunakan untuk memudahkan dokter dan perawat dalam mengetahui letak pasien dari masing-masing dokter spesialis sehingga dokter spesialis tidak perlu bertanya ke perawat jaga, apakah pasiennya ada atau tidak, cukup melihat daftar yang tertampang di setiap rawat inap dan mempercepat proses pelayanan baik dari waktu maupun tenaga.



Sekarang inovasi ini akan dikembangkan ke dalam aplikasi sehingga dokter spesialis cukup mengecek melalui *smartphone* nya sendiri sehingga dokter spesialis tidak perlu lagi mengecek ke seluruh ruangan ada tidaknya pasien yang harus dilayani sesuai dengan spesialisasinya.

6. Saluran Pengaduan Kita untuk Parikesit (SPEAKup)

SPEAKup adalah suatu aplikasi berbasis online yang memberikan kemudahan bagi pelanggan rumah sakit untuk menyampaikan aduan/keluhan terhadap pelayanan kesehatan yang kurang baik selama dilayani di rumah sakit. Karena SPEAKup berbasis online jadi keluhan/aduan bisa disampaikan dengan segera, dimanapun dan kapanpun. SPEAKup ini bisa diakses di <http://rsamp.online/speakup/>.



Gambar 2. 5. Tampilan SPEAKup

7. Hotline Maternal Si Pengawal Ibu ke Rumah Sakit (HotMa Si Penyair)

HotMa Si Penyair (Hotline Maternal Si Pengawal Ibu Ke Rumah Sakit) yaitu nomor telepon darurat khusus RS yang dapat dihubungi oleh petugas FKTP dalam menginformasikan kondisi pasien sebelum dirujuk ke RSUD AM Parikesit sehingga mendapat instruksi penanganan awal. Selain itu, informasi yang diterima membantu rumah sakit untuk menyediakan sarana dan prasarana, obat-obatan serta sumber daya manusia (SDM) yang memadai.

Sebelum adanya HotMa Si Penyair, pasien mendapat terapi berdasarkan instruksi Dokter Spesialis Kebidanan setelah berada di RS. Namun dengan konsep HotMa Si Penyair, terapi berdasarkan instruksi Dokter Spesialis Kebidanan bahkan sudah dilakukan sejak ibu berada di FKTP, bidan yang merujuk dapat berkonsultasi melalui HotMa Si Penyair apabila terjadi perubahan keadaan ibu selama dalam perjalanan ke RS. Dengan sistem ini





pasien tiba di RS dalam kondisi stabil, dan langsung mendapat penanganan secara komprehensif sehingga banyak nyawa ibu yang dapat terselamatkan.

Dampak dari HotMa Si Penyair ini, menurunnya jumlah kasus kematian ibu sejak tahun 2013 sampai 2016 dengan rata-rata 11 kematian per tahun menjadi 2 pada tahun 2017.

HotMa Si Penyair yang dimiliki RSUD AM Parikesit juga menjadi role model inovasi layanan kesehatan maternal di tingkat Kabupaten, Provinsi hingga Nasional.



Gambar 2. 6. Informasi HotMa Si Penyair

8. Wisma Transit

Wisma Transit ini diperuntukkan bagi keluarga pasien yang dirawat di RSUD AM Parikesit yang berasal dari luar kota Tenggarong. Keluarga pasien yang menempati wisma transit tidak dipungut biaya/gratis dengan hanya menjaminkan kartu identitas (KTP/SIM).



Gambar 2. 7. Wisma Transit RSUD AM Parikesit





9. Sistem Pengolah Data RBA BLUD (SiARBA)

SiARBA merupakan sistem informasi pengolah data RKA dan DPA BLUD yang dikembangkan di RSUD AM Parikesit. Aplikasi ini memudahkan rumah sakit dalam membuat, menginput, dan mendokumentasikan seluruh kegiatan yang berasal dari anggaran BLUD.



Gambar 2. 8. SiARBA





BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

RSUD AM Parikesit telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja RSUD AM Parikesit tahun 2021 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran suatu Perangkat Daerah. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan penentuan posisi sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai	Kriteria Penilaian	Kode
1.	90 >	Sangat Baik	Biru
2.	76 ≤ 90	Baik	Hijau
3.	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4.	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh RSUD AM Parikesit dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis RSUD AM Parikesit beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 3. 2. Capaian Kinerja RSUD AM Parikesit Tahun 2021

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria/Kode
1.	Meningkatnya Kinerja dan Akuntabilitas Perangkat Daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Skor	BB (71)	A (80,32)	113,13%	Sangat Baik
		Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/ Inspektorat pada Tahun berjalan maka Wajib untuk ditindak lanjuti paling lambat 60 hari kerja	Persen	100 %	100 %	100 %	Sangat Baik
		Persentase Identifikasi, Inventarisasi Aset dalam Penelusuran	Persen	100 %	100 %	100 %	Sangat Baik
		Pengamanan Bidang Tanah	Lokasi	4	4	100 %	Sangat Baik





No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria/Kode
		Persentase ketepatan Input Rencana Umum Pengadaan pada Aplikasi SiRUP (Maksimal 7 hari kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Maksimal 14 hari kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2022)	Persen	100 %	100 %	50 %	Sangat Rendah
		Tingkat Kepatuhan serta kelengkapan LHKPN pertanggal 31 Maret 2021	Persen	100 %	100 %	100 %	Sangat Baik
		Tingkat Kepatuhan LHKASN pertanggal 31 Maret 2021	Persen	100 %	100 %	100 %	Sangat Baik
		Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Skor	Baik (B) 60 - 70	28,4	47,33 %	Sangat Rendah
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Capaian Penilaian Pelayanan Publik (Kemenpan RB)	Nilai	Pelayanan Prima (4,75)	Pelayanan Prima (4,69)	98,74 %	Sangat Baik
3.	Tercapainya Standar Mutu Rumah Sakit	Persentase Indikator SPM yang Mencapai Target	Persen	85 %	75,76 %	89,13 %	Baik
		Peringkat Penilaian Akreditasi	Nilai	Paripurna (87)	Paripurna (83,51)	95,99 %	Sangat Baik
4.	Meningkatnya ketersediaan rumusan alternatif kebijakan daerah berbasis data dan informasi sesuai dengan fungsi perangkat daerah	Persentase ketersediaan rumusan alternatif kebijakan yang strategis dan insidental dalam bentuk dokumen telaahan staf	Persen	100 %	2.800 %	2.800 %	Sangat Baik
5.	Menurunnya Angka Kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara	Persentase Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan Program dan Kegiatan Berbasis pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	Persen	100 %	100 %	100 %	Sangat Baik

Berdasarkan Renstra RSUD AM Parikesit Tahun 2016-2021, pada tahun 2021 RSUD AM Parikesit hanya memiliki 3 (tiga) sasaran dan 4 (empat) indikator sasaran yang digunakan untuk mengukur ketercapaian sasaran tersebut. Namun, pada tahun 2021 ini oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, menetapkan seluruh Perangkat Daerah untuk membantu memperbaiki dan meningkatkan beberapa indikator tolak ukur keberhasilan pembangunan di Kutai Kartanegara. Sehingga pada tahun 2021, RSUD AM Parikesit memiliki 5 (lima) sasaran dan 13 (tiga belas) indikator sasaran.

Berdasarkan kriteria penilaian kinerja yang dilakukan, 8 (delapan) indikator sasaran memenuhi target yang ditetapkan (tercapai $\geq 100\%$), 2 (dua) indikator memenuhi kriteria penilaian kinerja (sangat baik $\geq 91\%$), dan 1 (satu) indikator memenuhi kriteria penilaian kinerja (baik $76 \leq 90\%$) serta 2 (dua) indikator yang tidak memenuhi kriteria kinerja (sangat rendah $\leq 50\%$).

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas dicapai melalui pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan. Program yang telah diselenggarakan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Pemenuhan UKP dan UKM.

1. Meningkatnya Kinerja dan Akuntabilitas Perangkat Daerah

Akuntabilitas kinerja perangkat daerah dilaksanakan bertujuan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja perangkat daerah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, dan terpercaya.

Tolak ukur capaian sasaran Meningkatnya Kinerja dan Akuntabilitas Perangkat Daerah diukur dengan 8 (delapan) indikator yaitu sebagai berikut:

1.1. Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Rumusan dari indikator predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah terlihat pada tabel 3.

Tabel 3.3. Pengukuran Kinerja dengan indikator predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah

No.	Sasaran	Indikator	Perumusan
1	Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas perangkat daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	$\frac{\text{Hasil Nilai SAKIP}}{\text{Target Nilai SAKIP}} \times 100\%$

Tabel 3.4. Capaian indikator predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah Tahun 2021

No.	Indikator	Target	Capaian	Persentase
1.	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	BB (71)	A (80,32)	113,13 %

Hasil nilai Evaluasi SAKIP RSUD AM Parikesit berdasarkan penilaian dari Inspektorat Kabupaten adalah 80,32 (delapan puluh koma tiga dua) dengan predikat penilaian “A” (Memuaskan). Dari target yang diinginkan sebesar 71 (BB), maka RSUD AM Parikesit telah memenuhi dan melampaui target yang ditetapkan dengan persentase capaian sebesar 113,13 % .





Berikut perbandingan target dan capaian pada indikator predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah tahun 2021 dan capaian indikator kinerja predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah per tahun terhadap target akhir Renstra disajikan dalam tabel 3.4 berikut ini:

Tabel 3.5. Capaian indikator kinerja predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah

No.	Indikator Kinerja	Capaian				2021			Target akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2021 terhadap target 2021
		2017	2018	2019	2020	Target	Capaian	%		
1.	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	C (32,88)	C (46,32)	B (69,53)	A (81,85)	BB (71)	A (80,32)	113,13	BB (71)	113,13

Jika capaian kinerja Tahun 2021 yaitu 80,32 dibandingkan dengan target akhir Renstra 71, persentase perbandingannya adalah 113,13 %. Berikut perbandingan pencapaian kinerja dari tahun 2017 hingga tahun 2021 ditunjukkan pada gambar grafik berikut ini:



Gambar 3. 1. Perbandingan Target dan Capaian Indikator Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dari Tahun 2017 - 2021

RSUD AM Parikesit Tahun 2020 memperoleh nilai AKIP sebesar 80,32 (A/Memuaskan). Penilaian tersebut menunjukkan Akuntabilitas Kinerja sudah sangat baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk peningkatan manajemen kinerja dan peningkatan pelayanan. Nilai tersebut juga menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya sudah memadai serta kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di RSUD AM Parikesit menunjukkan hasil yang baik.



Dalam lingkup OPD di lingkungan Pemerintahan Kab. Kutai Kartanegara, RSUD AM Parikesit berada pada urutan 4 (Empat) dari 40 (empat puluh) OPD yang dilakukan evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten. Secara perbandingan dengan capaian rata-rata OPD digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.6. Perbandingan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2020 dengan Instansi Lain di Kab. Kutai Kartanegara

Indikator Sasaran	Capaian			Capaian Tertinggi OPD Kukar	Perbandingan dengan OPD Tertinggi
	RSUD AM Parikesit	Rata-rata OPD Se-Kukar	Selisih		
Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	A (80,32)	BB (72,07)	+8,25 (111,44 %)	A (85,21)	-4,89 (94,26 %)

1.2. Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/Inspektorat pada Tahun berjalan maka Wajib untuk ditindak lanjuti paling lambat 60 hari kerja

Capaian indikator kinerja ini sebesar 100 % atau mencapai 100,00 % dari target yang ditetapkan.

Tabel 3.7. Rumusan Indikator Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/Inspektorat pada Tahun berjalan maka Wajib untuk ditindak lanjuti paling lambat 60 hari kerja

No.	Sasaran	Indikator	Perumusan
1	Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas perangkat daerah	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/ Inspektorat pada Tahun berjalan maka Wajib untuk ditindak lanjuti paling lambat 60 hari kerja	$\frac{\text{Hasil}}{\text{Target}} \times 100\%$

Tabel 3.8. Capain Indikator Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/Inspektorat pada Tahun berjalan maka Wajib untuk ditindak lanjuti paling lambat 60 hari kerja

No.	Indikator	Target	Capaian	Persentase
1.	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/Inspektorat pada Tahun berjalan maka Wajib untuk ditindak lanjuti paling lambat 60 hari kerja	100 %	100 %	100 %

Untuk Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan RSUD AM Parikesit Tahun 2021 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur menghasilkan tidak adanya temuan pada Laporan Keuangan. Hal ini berdasarkan tidak adanya surat konfirmasi dari Tim BPK setelah dilakukan audit pada saat pemeriksaan interim atas Laporan Keuangan RSUD AM Parikesit Tahun 2021.

1.3. Persentase Identifikasi, Inventarisasi Aset dalam Penelusuran

Indikator kinerja ini diukur berdasarkan jumlah aset yang terdata di RSUD AM Parikesit. Indikator kinerja ini mengukur keberhasilan pendataan jumlah aset yang dalam diketahui keberadaannya dibagi seluruh aset yang terdata.





Tabel 3.9. Rumusan Indikator Persentase Identifikasi, Inventarisasi Aset dalam Penelusuran

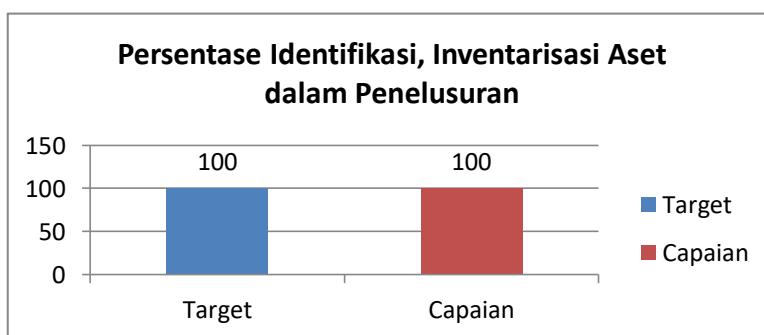
No.	Sasaran	Indikator	Perumusan
1	Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas perangkat daerah	Persentase Identifikasi, Inventarisasi Aset dalam Penelusuran	$\frac{\text{Hasil}}{\text{Target}} \times 100\%$

Berdasarkan penelusuran tim aset RSUD AM Parikesit yang didampingi oleh BPKAD Kabupaten, jumlah aset yang terdata adalah 105 juta telah berhasil ditelusuri. Dengan rincian alat dan mesin dengan kondisi rusak berat kemudian bangunan dengan kondisi masuk dalam kriteria kapitalisasi barang.

Tabel 3.10. Capaian Indikator Persentase Identifikasi, Inventarisasi Aset dalam Penelusuran

No.	Indikator	Target	Capaian	Persentase
1.	Persentase Identifikasi, Inventarisasi Aset dalam Penelusuran	100 %	100 %	100 %

Grafik tingkat capaian indikator kinerja antara target dan capaiannya terlihat pada gambar 3.2 berikut ini:



Gambar 3.2. tingkat capaian indikator kinerja antara target dan capaian

1.4. Pengamanan Bidang Tanah

Berdasarkan data aset tanah dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Kutai Kartanegara, RSUD AM Parikesit mengelola 4 (empat) tanah bangunan seperti data pada tabel 3.9 berikut ini:

Tabel 3.11. Data Tanah RSUD AM Parikesit

No.	Nama Tanah	Penggunaan	Alamat	Status	Luas (M ²)
1.	Tanah Bangunan Mess/ Wisma/Asrama	Tanah bangunan asrama perawat	Jl. Panjaitan	Sertifikat	1.620
2.	Tanah bangunan perumahan lain-lain	Tanah untuk rumah dinas dokter	Jl. Imam Bonjol	Belum Sertifikat	3.330,25
3.	Tanah bangunan perumahan lain-lain	Tanah untuk rumah dinas dokter spesialis	Jl. Gunung Menyapa	Belum Sertifikat	1.777,50
4.	Tanah bangunan rumah sakit	Tanah yang di bangunan rumah sakit + kantor + asrama dan mess perawat	Jl. Imam Bonjol	Belum Sertifikat	66.632

sumber data : BPKAD Kab. Kukar





Berdasarkan data aset tanah yang diberikan oleh BPKAD kepada RSUD AM Parikesit, RSUD AM Parikesit mendata :

- Bidang tanah Asrama Perawat jalan Panjaitan dengan status sertifikat Nomor: 1943/1983 tertanggal 1 Februari 1983.
- Bidang tanah Perumahan Dokter jalan Imam Bonjol dengan status sertifikat Terbit tanggal 25 Agustus 2021 nomor SHP 00026 dengan luas lahan 3.367 M².
- Ex Rumah Sakit lama jalan Imam Bonjol diserahkan terima ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Kutai Kartanegara dengan Nomor: B-2225/BPKAD/BAS.1/032/11/2021 tertanggal 9 November 2021.
- Bidang tanah Perumahan Dokter jln Gn Menyapa dengan status telah memiliki patok dan telah diberi pagar.

Tabel 3.12. Capaian kinerja pengamanan bidang tanah

No.	Sasaran	Indikator	Perumusan	Target	Capaian	Persentase
1	Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas perangkat daerah	Persentase pengamanan bidang tanah	$\frac{\text{Hasil}}{\text{Target}} \times 100\%$	100 %	100 %	100 %



Gambar 3. 3. Capaian kinerja pengamanan bidang tanah

1.5. Persentase ketepatan Input Rencana Umum Pengadaan pada Aplikasi SiRUP (Maksimal 7 hari kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Maksimal 14 hari kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2022)

Indikator persentase ketepatan Input Rencana Umum Pengadaan pada Aplikasi SiRUP ini berdasarkan penginputan pengadaan pada Aplikasi SiRUP dengan batas waktu maksimal 7 hari kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Maksimal 14 hari kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2022. Capaian indikator kinerja hanya tercapai



sebesar 50% dari target yang diinginkan sebesar 100% atau dengan tingkat capaian sebesar 50%.

Fleksibilitas penganggaran pada BLUD yang mengakibatkan tingginya pergeseran antar anggaran belanja sehingga mengalami kesulitan penginputan pada aplikasi SIRUP dalam 7 hari kerja setelah penandatanganan Perjanjian Kinerja.

Tabel 3.13. Capaian indikator kinerja ketepatan Input Rencana Umum Pengadaan pada Aplikasi SiRUP

No.	Sasaran	Indikator	Perumusan	Target	Capaian	Persentase
1	Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas perangkat daerah	Percentase ketepatan Input Rencana Umum Pengadaan pada Aplikasi SiRUP	$\frac{\text{Hasil}}{\text{Target}} \times 100\%$	100 %	50 %	50 %



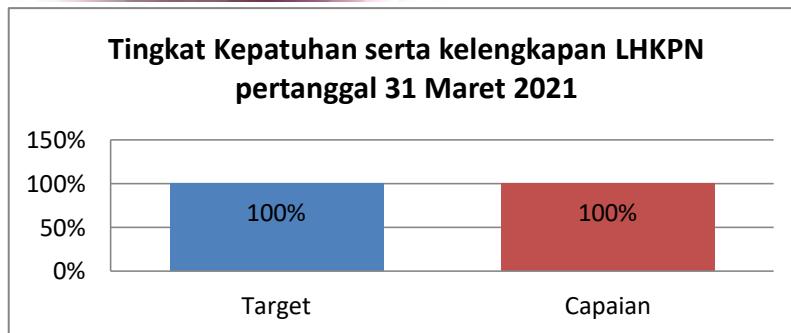
Gambar 3. 4. Target dan Capaian persentase ketepatan input rencana umum pengadaan pada aplikasi SiRUP

1.6. Tingkat Kepatuhan serta kelengkapan LHKPN pertanggal 31 Maret 2021

Tingkat kepatuhan penyampaian LHKPN RSUD AM Parikesit tahun 2021 mencapai 100%, dimana Informasi pengumuman harta kekayaan penyelenggaraan negara yang tercantum dalam situs e-Announcement LHKPN adalah sesuai dengan yang telah dilaporkan oleh Penyelenggara Negara dalam LHKPN.

Tabel 3.14. Capaian Indikator Tingkat Kepatuhan serta kelengkapan LHKPN pertanggal 31 Maret 2021

No.	Sasaran	Indikator	Perumusan	Target	Capaian	Persentase
1	Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas perangkat daerah	Tingkat Kepatuhan serta kelengkapan LHKPN pertanggal 31 Maret 2021	$\frac{\text{Hasil}}{\text{Target}} \times 100\%$	100 %	100 %	100 %



Gambar 3. 5. Perbandingan Target dan Capaian Indikator Tingkat Kepatuhan serta kelengkapan LHKPN pertanggal 31 Maret 2021

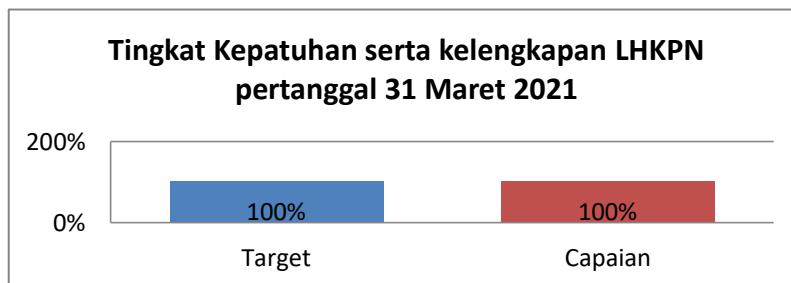
1.7. Tingkat Kepatuhan LHKASN pertanggal 31 Maret 2021

Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan ASN yang dituangkan dalam formulir LHKASN yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Harta kekayaan ASN merupakan ranah pribadi namun tidak sepenuhnya menjadi privat melainkan menjadi sarana pengendalian dalam penyelenggaraan negara dalam rangka menciptakan Aparatur Sipil Negara yang bersih dan berwibawa serta bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berdasarkan data Inspektorat Kabupaten, dimana seluruh ASN di RSUD AM Parikesit telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan ke situs siharka.menpan.go.id atau tingkat kepatuhan penyampaian ASN di RSUD AM Parikesit tahun 2021 mencapai 100%.

Tabel 3.15. Capaian Indikator Tingkat Kepatuhan serta kelengkapan LHKASN pertanggal 31 Maret 2021

No.	Sasaran	Indikator	Perumusan	Target	Capaian	Persentase
1	Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas perangkat daerah	Tingkat Kepatuhan serta kelengkapan LHKASN pertanggal 31 Maret 2021	$\frac{\text{Hasil}}{\text{Target}} \times 100\%$	100 %	100 %	100 %



Gambar 3. 6. Perbandingan Target dan Capaian Indikator Tingkat Kepatuhan serta kelengkapan LHKASN pertanggal 31 Maret 2021

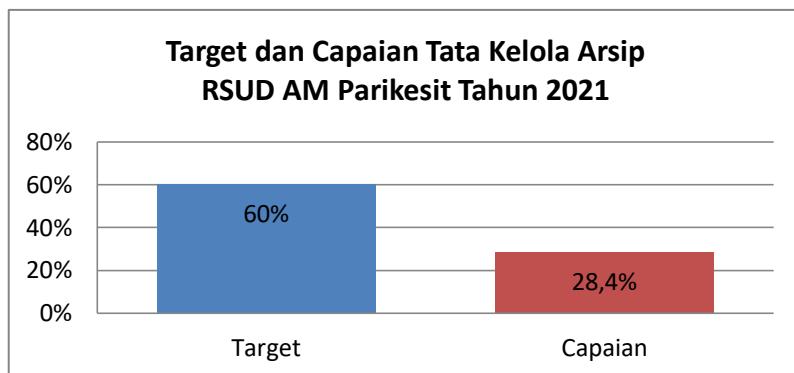
1.8. Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah

Tabel 3.16. Rumusan dan Capaian Indikator Kinerja Predikat Tata Kelola Arsip RSUD AM Parikesit Tahun 2021

No.	Sasaran	Indikator	Perumusan	Target	Capaian	Persentase
1	Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas perangkat daerah	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	$\frac{\text{Hasil}}{\text{Target}} \times 100\%$	60	28,4	47,33 %

Hasil nilai tata kelola arsip RSUD AM Parikesit berdasarkan penilaian dari Dinas Kerasipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah 28,4 (dua puluh delapan koma empat) dengan predikat penilaian “D” (sangat kurang). Dari target yang ditetapkan sebesar 60 (B), maka RSUD AM Parikesit belum memenuhi target yang ditetapkan dengan persentase capaian sebesar 47,3 %.

RSUD AM Parikesit selama ini telah melakukan kearsipan sesuai tuntunan Standar Akreditasi Rumah Sakit namun ternyata tidak sesuai dengan peraturan kearsipan perangkat daerah yang berlaku.



Gambar 3. 7. Target dan Capaian Tata Kelola Arsip RSUD AM Parikesit Tahun 2021

Upaya mendukung sasaran dan seluruh indikator kinerja ini, sasaran pertama ini ditopang oleh 1 (satu) program, 2 (dua) kegiatan, dan 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terealisasi dana sebesar Rp. 61.534.021.411,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp. 65.536.620.106,00 atau 93,89 % dan dengan tingkat efisiensi anggaran 6,11 %.

Adapun faktor pendorong yang mempengaruhi tercapainya indikator tersebut, yaitu:

- a. Mereview dan merevisi Rencana Strategis RSUD AM Parikesit dalam hal perencanaan dan pengukuran kinerja berdasarkan hasil evaluasi dari Inspektorat dan Bappeda.
- b. Merumuskan *cascading* kinerja dengan menggambarkan sasaran yang akan diwujudkan dengan program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai upaya mencapai sasaran.
- c. Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian kinerja utama (*core business*) atau sasaran strategisnya.
- d. Monitoring dan evaluasi kinerja dilakukan secara terus menerus sehingga perencanaan dan pelaksanaan kinerja dapat ditingkatkan baik efisiensi maupun efektivitasnya.
- e. Telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) sehingga indikator sasaran bisa tercapai dan mendukung pelaksanaan kegiatan.
- f. Secara umum RSUD AM Parikesit telah menerapkan budaya kinerja dan tunjangan kinerja berdasarkan indikator kinerja individu yang ditetapkan di RSUD AM Parikesit.

Walaupun capaian kinerja indikator telah melampui target, namun masih ada beberapa kendala, diantaranya:

- 1) Menurunnya kualitas implementasi SAKIP oleh Perangkat Daerah.
- 2) Beberapa unit kerja belum menyampaikan data secara tepat waktu.
- 3) Belum seluruh unit kerja melakukan reviu kinerja internal secara berkala untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan kinerja serta solusi yang diperlukan untuk mencapai target kinerja yg lebih baik.
- 4) Koordinasi antar unit kerja yang belum optimal.
- 5) Banyaknya perubahan regulasi terkait rumah sakit.
- 6) Terbatasnya SDM dan tingginya beban kerja sehingga berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan.

2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Tolak ukur capaian sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik yaitu Capaian Penilaian Pelayanan Publik (Kemenpan RB).

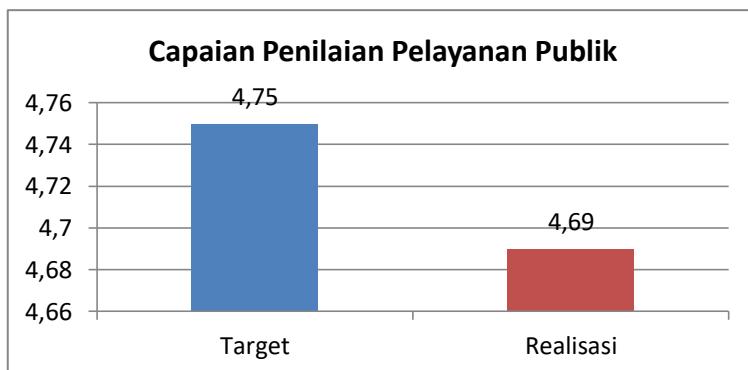




Tabel 3.17. Rumusan Indikator Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

No.	Sasaran	Indikator	Perumusan
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Capaian Penilaian Pelayanan Publik	$\frac{\text{Nilai Pelayanan Publik}}{\text{Target Nilai Pelayanan Publik}} \times 100\%$

Kinerja sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator capaian penilaian pelayanan publik dapat dilihat dari gambar berikut:



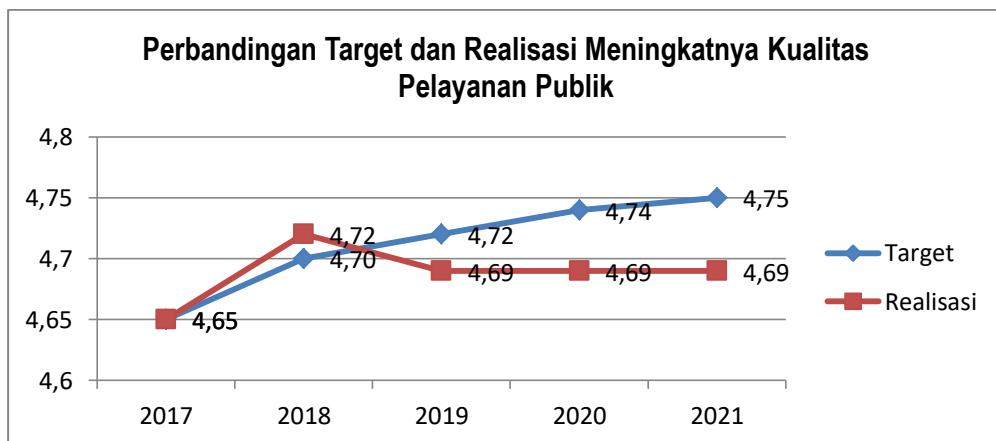
Gambar 3. 8. Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target akhir Renstra pada tahun 2021 disajikan dalam tabel 3.18 berikut ini:

Tabel 3.18.Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik per Tahun

No.	Indikator Kinerja	Capaian 2018	Capaian 2019	Capaian 2020	2021			Capaian terhadap target 2021 (%)
					Target	Realisasi	%	
1	Capaian Penilaian Pelayanan Publik	Prima (4,73)	Prima (4,69)	Prima (4,69)	Prima (4,69)	98,74 (Sangat baik)	Prima (4,75)	98,74

Perbandingan realisasi kinerja hingga tahun 2021 dengan target tahunan Renstra ditampilkan pada gambar berikut:



Gambar 3. 9. Perbandingan Target dan Realisasi Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dari Tahun 2017-2021





Berdasarkan penilaian pelayanan publik terhadap RSUD AM Parikesit, Kemenpan-RB memberikan penilaian dengan nilai 4,69 dengan predikat "A" (*Pelayanan Prima*) sehingga capaian kinerja yang diraih sebesar 98,74 %. Hasil ini belum memenuhi target yang diinginkan namun dalam hal kategori/predikat RSUD AM Parikesit tercapai yaitu Pelayanan Prima dimana ambang batas nilai tersebut adalah 4,50.

Adapun faktor pendukung sasaran capaian penilaian pelayanan publik yaitu:

- a. Komitmen bersama terhadap kualitas pelayanan publik dan kesehatan.
- b. Pendampingan dari pihak Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kutai Kartanegara dalam pemenuhan penilaian pelayanan publik.
- c. Selalu adanya ide-ide dan inovasi yang dibuat dalam memudahkan pelayanan kesehatan.
- d. Pemanfaatan teknologi informasi yang semakin baik dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- e. Penerapan *reward* dan *punishment* terhadap karyawan sehingga terjaganya kualitas pelayanan kesehatan dan pelayanan publik.
- f. Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan yang lebih berkualitas dan berdasarkan standar penilaian pelayanan publik.
- g. Terbukanya pihak manajemen RSUD AM Parikesit dalam pengelolaan Komplain baik internal maupun eksternal.
- h. Telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) sehingga indikator sasaran bisa tercapai dan mendukung pelaksanaan kegiatan.
- i. Secara umum RSUD AM Parikesit telah menerapkan budaya kinerja dan tunjangan kinerja berdasarkan indikator kinerja individu.

Namun, pencapaian tersebut belum memenuhi target yang diharapkan dikarenakan:

- i. Semakin selektifnya surveyor dalam melakukan penilaian pelayanan publik.
- ii. Jumlah peserta yang bertambah dan semakin agresifnya OPD daerah lain dalam memenuhi indikator penilaian pelayanan publik.





- iii. Terbatasnya SDM yang tersedia dan tingginya beban kerja sehingga berpengaruh terhadap kualitas pelayanan.
- iv. Makin tingginya standar kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.

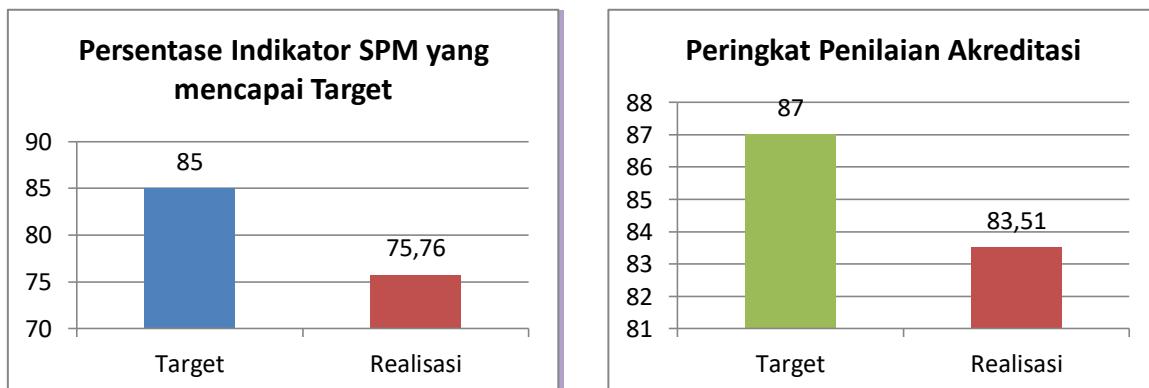
3. Tercapainya Standar Mutu Rumah Sakit

Tolak ukur capaian sasaran Tercapainya Standar Mutu diukur dengan 2 (dua) indikator yaitu Persentase Indikator SPM yang Mencapai Target dan Peringkat Penilaian Akreditasi.

Tabel 3.19. Rumusan Indikator Sasaran Tercapainya Standar Mutu Rumah Sakit

No.	Sasaran	Indikator	Perumusan
1	Tercapainya Standar Mutu Rumah Sakit	Persentase Indikator SPM yang Mencapai Target	$\frac{\text{Indikator SPM yang mencapai target}}{\text{Seluruh Indikator SPM}} \times 100\%$
		Peringkat Penilaian Akreditasi	$\frac{\text{Hasil Nilai Akreditasi RS}}{\text{Target Nilai Akreditasi RS}} \times 100\%$

Kinerja sasaran Tercapainya standar mutu rumah sakit dengan indikator persentase indikator SPM yang mencapai target pada tahun 2021 dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 3. 10. Target dan Realisasi Sasaran Tercaapainya Standar Mutu Rumah Sakit

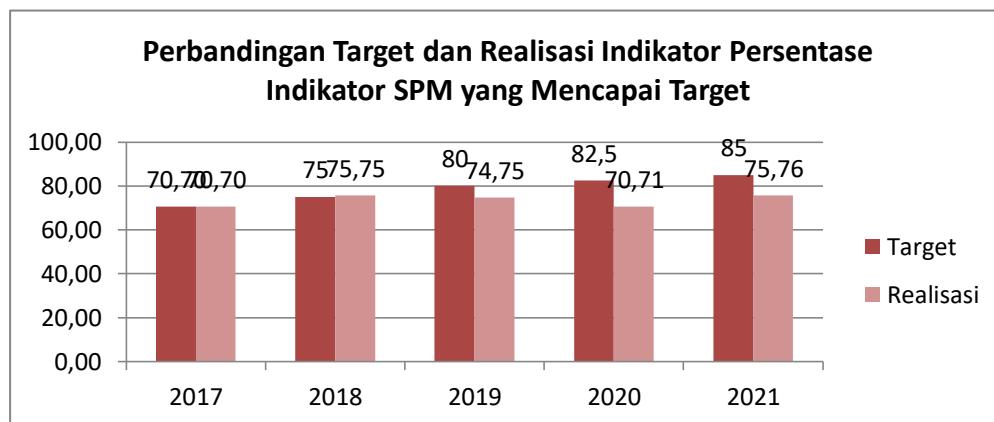
Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target akhir Renstra pada tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.20. Target dan Realisasi Sasaran Tercapainya Standar Mutu Rumah Sakit

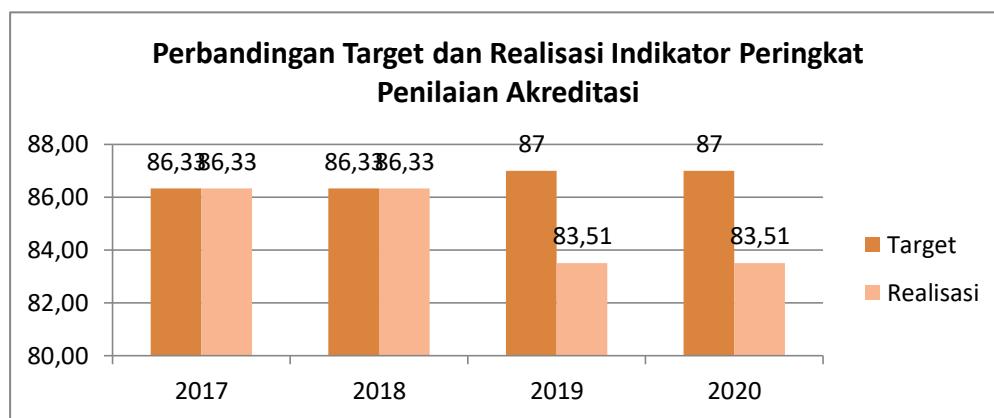
No.	Indikator Kinerja	Capaian				2021			Capaian terhadap target 2021
		2017	2018	2019	2020	Target	Realisasi	%	
1	Persentase Indikator SPM yang Mencapai Target	70,70	75,75	74,75	70,71	85	75,76	89,13	89,13 %
2	Peringkat Penilaian Akreditasi	86,33	86,33	86,33	83,51	87	83,51	95,99	95,99 %



Perbandingan realisasi indikator kinerja hingga tahun 2021 dengan target tahunan Renstra ditampilkan pada gambar berikut:



Gambar 3. 11. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Indikator SPM yang mencapai target dari tahun 2017-2021



Gambar 3. 12. Target dan Realisasi Indikator Peringkat Penilaian Akreditasi dari tahun 2017-2021

Berdasarkan hasil persentase indikator SPM yang mencapai target pada tahun 2021, RSUD AM Parikesit mencapai 75,76 % sehingga capaian kinerja yang diraih sebesar 89,13 % dari target sebesar 85 % sehingga hasil ini belum memenuhi target yang diinginkan. Dan pada indikator peringkat penilaian akreditasi, RSUD AM Parikesit mendapatkan nilai 83,51 dengan predikat Paripurna sehingga capaian kinerja yang diraih sebesar 95,99 %. Hasil ini belum memenuhi target yang diinginkan namun dalam hal predikat RSUD AM Parikesit tercapai yaitu Paripurna dimana ambang batas minimalnya adalah 80,00.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah:



- a. Komitmen bersama terhadap kualitas pelayanan kesehatan yang terstandar berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit dan Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit.
- b. Dukungan dari Pemerintah Daerah selaku pemilik Rumah Sakit dalam pemenuhan Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit.
- c. Pemenuhan Standar Rumah Sakit berdasarkan Elemen Penilaian Akreditasi Rumah Sakit.
- d. Penyediaan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal (SPM) Rumah Sakit dan Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit.
- e. Pendampingan yang intensif dari Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) dan RSUP Dr. Kariadi Semarang dalam hal bimbingan peningkatan mutu dan akreditasi RS.
- f. Pemanfaatan teknologi informasi yang semakin baik dalam peningkatan kualitas mutu dan menjaga mutu di Rumah Sakit.
- g. Telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) sehingga indikator sasaran bisa tercapai dan mendukung pelaksanaan kegiatan.

Dari tabel dan gambar di atas, sasaran tercapainya standar mutu rumah sakit tidak mencapai 100% karena terkendala dengan permasalahan:

- i. Tingginya target indikator yang ditetapkan.
- ii. Adanya perubahan penilaian Akreditasi dari versi KARS 2012 ke versi SNARS 2018.
- iii. Bertambah dan berubahnya indikator elemen penilaian akreditasi rumah sakit.
- iv. Banyaknya perubahan regulasi terkait akreditasi rumah sakit.
- v. Berkurangnya SDM sehingga kinerja pelayanan jadi terhambat.
- vi. Adanya peraturan terbaru terkait perekruit SDM sehingga pihak Rumah Sakit belum bisa merekrut SDM Non PNS.
- vii. Terjadi penurunan kualitas layanan pada beberapa indikator.

4. Meningkatnya Ketersediaan Rumusan Alternatif Kebijakan Daerah Berbasis Data dan Informasi sesuai dengan Fungsi Perangkat Daerah



**Daftar Program/Inovasi**

NO.	INOVASI / PROGRAM	KETERANGAN
1.	SIMARI	Sistem Informasi Manajemen Admisi Rawat Inap
2.	SIPULAN	Sistem Informasi Pendaftaran Online Rawat Jalan
3.	PARIKESIT MOTHER CARE	Program Unggulan Pelayanan Bagi Ibu dan Anak
4.	SIMPEG	Sistem Informasi Kepegawaian
5.	SIPANDA	Sistem Pemantauan Pengadaan Barang dan Jasa
6.	SIMUNE	Sistem Remunerasi
7.	SIMASK	Sistem Manajemen Surat Masuk dan Keluar
8.	SPEAK UP	Saluran Pengaduan Kita untuk Parikesit
9.	SPIKR	Saluran Pengaduan Internal Karyawan Rumah Sakit
10.	SIUMPAN	Sistem Pemantauan Penyelesaian Masalah
11.	SUPERVISI	Sistem Rekapitulasi Capaian Kinerja
12.	SIIKI	Sistem Informasi Penilaian Kinerja
13.	RADIOLOGI ONLINE	Radiologi Online
14.	LabOI	Laboratorium Online
15.	FAROL	Farmasi Online
16.	CASEMIX	Sistem Informasi Pemilahan dan Penginputan Pembayaran Kesehatan
17.	SIMANDAU AKSI	Sistem Manajemen Data Mutu, Budaya Keselamatan dan Risiko Terintegrasi
18.	E-MR	Sistem Penginputan Riwayat Pasien (Rekam Medis)
19.	SIPPI	Sistem Informasi Pengendalian Infeksi di RSUD AM Parikesit
20.	AKURASI MAPAN	Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan
21.	DARVIDOS	Daftar Visite Dokter Spesialis di Rawat Inap
22.	WISMA TRANSIT	Tempat Menunggu bagi Keluarga Pasien yang sedang dari Luar Kota Tenggarong
23.	KAIZEN EVENT	Program Tahunan untuk Menciptakan dan Membuat Inovasi di RSUD AM Parikesit
24.	SIARKIT	Sistem informasi Aset Rumah Sakit
25.	Hotma Si Penyair	Hotline Maternal si Pengawal Ibu ke Rumah Sakit
26.	Kebijakan MOD dan AssMOD	Program Pengendalian dan Pengawasan dari Manajemen Rumah Sakit di luar Jam Kerja
27.	Laundry Komersil	Laundry diluar karyawan Rumah Sakit



NO.	INOVASI / PROGRAM	KETERANGAN
28.	Absensi Online	Pelaksanaan Absensi Kehadiran yang dilakukan secara Online yang harus dilakukan di dalam Lingkungan Rumah Sakit

Tolak ukur indikator kinerja dari sasaran meningkatnya ketersediaan rumusan alternatif kebijakan daerah berbasis data dan informasi sesuai dengan fungsi perangkat daerah diukur dengan 1 (satu) indikator yaitu Persentase ketersediaan rumusan alternatif kebijakan yang strategis dan insidental dalam bentuk dokumen telaahan staf.

Tabel 3.21. Rumusan dan Capaian Meningkatnya ketersediaan rumusan alternatif kebijakan daerah berbasis data dan informasi sesuai dengan fungsi perangkat daerah

No.	Sasaran	Indikator	Perumusan	Target	Capaian	Persen-tase
1	Meningkatnya ketersediaan rumusan alternatif kebijakan daerah berbasis data dan informasi sesuai dengan fungsi perangkat daerah	Persentase ketersediaan rumusan alternatif kebijakan yang strategis dan insidental dalam bentuk dokumen telaahan staf	$\frac{\text{Hasil}}{\text{Target}} \times 100\%$	100 %	2.800 %	2.800 %

Adapun faktor pendorong yang mempengaruhi tercapainya indikator tersebut, yaitu:

- Dukungan penuh dan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan di RSUD AM Parikesit terutama Direktur.
- Telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) sehingga indikator sasaran bisa tercapai dan mendukung pelaksanaan kegiatan.
- Pendampingan dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur.
- Selalu adanya ide-ide dan inovasi yang dibuat dalam memudahkan tugas dan fungsi perangkat daerah.
- Pemanfaatan teknologi informasi yang semakin baik.
- Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana yang lebih berkualitas dan berdasarkan standar penilaian pelayanan publik.





g. Terbukanya pihak manajemen RSUD AM Parikesit dalam pengelolaan Komplain baik internal maupun eksternal.

Walaupun capaian kinerja indikator telah melampui target, namun masih ada beberapa kendala, diantaranya:

- 1) Belum seluruh unit kerja melakukan reviu kinerja internal secara berkala untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan kinerja serta solusi yang diperlukan untuk mencapai target kinerja yg lebih baik.
- 2) Koordinasi antar unit kerja yang belum optimal.
- 3) Banyaknya perubahan regulasi terkait rumah sakit.

5. Menurunnya Angka Kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara

SIPAGI (Parikesit Peduli dan Berbagi) sebuah program sosial RSUD AM Parikesit dalam membantu meringankan beban biaya bagi pasien-pasien tidak mampu atau tanpa jaminan kesehatan. Pendanaan ini berasal seluruh karyawan RSUD AM Parikesit yang disalurkan melalui 3 (tiga) kotak amal yang ditempatkan di gedung Garuda dan bisa juga melalui nomor rekening yang disediakan untuk program sosial tersebut.

Program ini juga diperuntukkan untuk membantu program pemerintah dalam hal Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tolak ukur indikator kinerja menurunnya angka kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu Persentase Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan Program dan Kegiatan Berbasis pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Berikut ditampilkan rumusan dan capaian dari sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tabel 3.22 berikut:

Tabel 3.22. Rumusan dan Capaian Sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	Sasaran	Indikator	Perumusan	Target	Capaian	Persentase
1	Menurunnya Angka Kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara	Persentase Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan Program dan Kegiatan Berbasis pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	$\frac{\text{Hasil}}{\text{Target}} \times 100\%$	100 %	100 %	100 %

Adapun faktor pendorong yang mempengaruhi tercapainya indikator tersebut, yaitu:





- a. Komitmen bersama dalam membantu kesejahteraan sosial di Kutai Kartanegara.
- b. Tinggi antusias karyawan RSUD AM Parikesit dalam berbagi.

Dari 4 (empat) sasaran, yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Tercapainya Standar Mutu Rumah Sakit, Meningkatnya ketersediaan rumusan alternatif kebijakan daerah berbasis data dan informasi sesuai dengan fungsi perangkat daerah, dan Menurunnya Angka Kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara, didukung oleh Program Pemenuhan UKP dan UKM yang ditopang oleh dua kegiatan dan dua sub kegiatan.

Program ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 279.133.159.450,00 dan terealisasi sebesar Rp. 236.526.247.342,31 atau 84,74 % dengan tingkat efisiensi 15,26 %.

C. Realisasi Penggunaan Anggaran

Penyerapan anggaran pada tahun 2021 sebesar Rp. 298.060.268.753,31 (86,48%) dari total anggaran Rp. 344.669.779.556,00 yang dialokasikan dari APBD, DAK, dan BLUD. Adapun rincian total realisasi anggaran yang dikelola RSUD AM Parikesit Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 3.23. Rincian Belanja Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2021

No.	Rincian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Tingkat Efisiensi
1.	Belanja Operasi	287.795.043.368,00	251.594.938.474,00	87,42 %	12,58 %
2.	Belanja Modal	56.874.736.188,00	46.473.036.396,00	81,71 %	18,29 %
Jumlah		344.669.779.556,00	298.067.974.870,00	86,48 %	13,52 %

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100 % menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2021 mencukupi.

Dari 2 (dua) program, 4 (empat) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan yang ditetapkan, semua program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut bisa direalisasikan dan dilaksanakan. Anggaran dan realisasi belanja tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:



Tabel 3. 24. Uraian Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RSUD AM Parikesit Tahun 2021

NO	URAIAN	KINERJA			ANGGARAN		Percentase Penyerapan	Tingkat Efisiensi
		TARGET	CAPAIAN	%	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)		
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	100	100	65.536.620.106,00	61.534.021.411,00	93,89 %	6,11 %
a.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12	12	100	39.546.128.129,00	36.951.583.023,00	93,44 %	6,56 %
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	12	100	39.414.203.649,00	36.935.823.023,00	93,71 %	6,29 %
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	1	1	100	131.924.480,00	15.760.000,00	11,95 %	88,05 %
b.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daaerah	12	12	100	25.990.491.977,00	24.582.438.388,00	94,58 %	5,42 %
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	12	100	25.990.491.977,00	24.582.438.388,00	94,58 %	5,42 %
II	Program Pemenuhan UKP dan UKM	100	100	100	279.133.159.450,00	236.526.247.342,31	84,74 %	15,26 %
c.	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	90	88,71	98,57	35.144.290.579,00	34.693.261.670,00	98,72 %	1,28 %
4.	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1	1	100	35.144.290.579,00	34.693.261.670,00	98,72 %	1,28 %
d.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	89	80,41	90,35	243.988.868.871,00	201.832.985.672,31	82,72 %	17,28 %
5.	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	96.800	106.726	110,25	243.988.868.871,00	201.832.985.672,31	82,72 %	17,28 %
Jumlah					344.669.779.556	298.060.268.753,31	86,48 %	13,52 %

D. Capaian dan Efisiensi Pencapaian Sasaran Strategis

Berdasarkan pencapaian hasil kinerja per sasaran dan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran

pembangunan telah mencukupi. Anggaran dan realisasi belanja langsung Tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 25. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2021

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	Meningkatnya Kinerja dan Akuntabilitas Perangkat Daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	BB (71)	A (80,32)	113,13	65.536.620.106,00	61.534.021.411	93,89
		Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/ Inspektorat pada Tahun berjalan maka Wajib untuk ditindak lanjuti paling lambat 60 hari kerja	100 %	100 %	100			
		Percentase Identifikasi, Inventarisasi Aset dalam Penelusuran	100 %	91,49 %	91,49			
		Pengamanan Bidang Tanah	4	4	100			
		Percentase ketepatan Input Rencana Umum Pengadaan pada Aplikasi SiRUP (Maksimal 7 hari kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Maksimal 14 hari kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2022)	100 %	100 %	50			
		Tingkat Kepatuhan serta kelengkapan LHKPN pertanggal 31 Maret 2021	100 %	100 %	100			
		Tingkat Kepatuhan LHKASN pertanggal 31 Maret 2021	100 %	100 %	100			
		Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Baik (B) 60 - 70	28,4	47,33			
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Capaian Penilaian Pelayanan Publik (Kemenpan RB)	Pelayanan Prima (4,74)	Pelayanan Prima (4,69)	98,95	279.133.159.450,00	236.526.247.342,31	84,74
3.	Tercapainya Standar Mutu Rumah Sakit	Percentase Indikator SPM yang Mencapai Target	85	75,76	89,13			
		Peringkat Penilaian Akreditasi	87	83,51	95,99			

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
4.	Meningkatnya ketersediaan rumusan alternatif kebijakan daerah berbasis data dan informasi sesuai dengan fungsi perangkat daerah	Persentase ketersediaan rumusan alternatif kebijakan yang strategis dan insidental dalam bentuk dokumen talaahan staf	100	2.800	2.800			
5.	Menurunnya Angka Kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara	Persentase Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan Program dan Kegiatan Berbasis pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	100	100	100			
TOTAL						344.669.779.556,00	298.060.268.753,31	86,48

Dari 3 (tiga) sasaran di atas, bisa disimpulkan bahwa hanya 1 (satu) sasaran yang masuk kategori Efisien, yaitu Sasaran Meningkatnya Kinerja dan Akuntabilitas Perangkat Daerah dengan tingkat efisiensi anggaran sebesar 6,11 % dengan Capaian kinerja 113,13 %. Berikut tingkat efisiensi sasaran disajikan dalam table 3.13 dibawah ini:

Tabel 3.26. Tingkat Efisiensi Sasaran per program

No.	Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja ($\geq 100\%$)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Kinerja dan Akuntabilitas Perangkat Daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	113,13 %	93,89	6,11 %





BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) RSUD AM Parikesit tahun 2021 merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja Perangkat Daerah serta seluruh pemangku kepentingan baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dan dapat sebagai sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Penyelenggaraan kegiatan di RSUD AM Parikesit pada Tahun Anggaran 2021 merupakan tahun keempat dari Renstra Perubahan RSUD AM Parikesit Tahun 2016-2021. Keberhasilan yang dicapai berkat kerjasama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. RSUD AM Parikesit telah dapat merealisasikan pencapaian sasaran strategis pada tahun 2021.

Tabel 4. 1. Hasil Capaian Kinerja Sasaran RSUD AM Parikesit Tahun 2021

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria/Kode
1. Meningkatnya Kinerja dan Akuntabilitas Perangkat Daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Skor	BB (71)	A (80,32)	113,13%	Sangat Baik	
	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/ Inspektorat pada Tahun berjalan maka Wajib untuk ditindak lanjuti paling lambat 60 hari kerja	Persen	100 %	100 %	100 %	Sangat Baik	
	Persentase Identifikasi, Inventarisasi Aset dalam Penelusuran	Persen	100 %	100 %	100 %	Sangat Baik	
	Pengamanan Bidang Tanah	Lokasi	4	4	100 %	Sangat Baik	
	Persentase ketepatan Input Rencana Umum Pengadaan pada Aplikasi SiRUP (Maksimal 7 hari kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Maksimal 14 hari kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2022)	Persen	100 %	50 %	50 %	Sangat Rendah	
	Tingkat Kepatuhan serta kelengkapan LHKPN pertanggal 31 Maret 2021	Persen	100 %	100 %	100 %	Sangat Baik	
	Tingkat Kepatuhan LHKASN pertanggal 31 Maret 2021	Persen	100 %	100 %	100 %	Sangat Baik	
	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Skor	Baik (B) 60 - 70	28,4	47,33 %	Sangat Rendah	





No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria/Kode
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Capaian Penilaian Pelayanan Publik (Kemenpan RB)	Nilai	Pelayanan Prima (4,75)	Pelayanan Prima (4,69)	98,74 %	Sangat Baik
3.	Tercapainya Standar Mutu Rumah Sakit	Persentase Indikator SPM yang Mencapai Target	Persen	85 %	75,76 %	89,13%	Baik
		Peringkat Penilaian Akreditasi	Nilai	Paripurna (87)	Paripurna (83,51)	95,99 %	Sangat Baik
4.	Meningkatnya ketersediaan rumusan alternatif kebijakan daerah berbasis data dan informasi sesuai dengan fungsi perangkat daerah	Persentase ketersediaan rumusan alternatif kebijakan yang strategis dan insidental dalam bentuk dokumen telaahan staf	Persen	100 %	2.800 %	2.800 %	Sangat Baik
5.	Menurunnya Angka Kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara	Persentase Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan Program dan Kegiatan Berbasis pada Data Terpadu Kesejateraan Sosial (DTKS)	Persen	100 %	100 %	100 %	Sangat Baik

Tabel 4. 2. Rincian Belanja Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2021

No.	Rincian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Tingkat Efisiensi
1.	Belanja Operasi	287.795.043.368,00	251.594.938.474,00	87,42 %	12,58 %
2.	Belanja Modal	56.874.736.188,00	46.473.036.396,00	81,71 %	18,29 %
Jumlah		344.669.779.556,00	298.067.974.870,00	86,48 %	13,52 %

Secara umum, pencapaian target tidak mengalami kendala yang signifikan meskipun masih terdapat permasalahan yang dapat menghambat peningkatan kinerja seperti kompleksitas penyusunan perencanaan pembangunan sebagai bagian dari pelaksanaan regulasi perencanaan dari pemerintah serta instrument monitoring dan evaluasi pembangunan yang masih bersifat kuantitatif.

Plt. Direktur
RSUD Aji Muhammad Parikesit,



MARTINA YULIANTI
Pembina Utama Muda
NIP. 19710712 200012 2 002





LAMPIRAN





Lampiran 1. Perjanjian Kinerja 2021

PROGRAM DILAKUKAN PADA TAHUN 2001 SENTRAL BANK INDONESIA DAN BERSAMA-SAMA DILAKUKAN MANAJEMEN RISIKO BANK KARANGKAJA				
No.	Kode	Kegiatan Analisa Risiko	Risiko	Kontrol
	1	Analisa Risiko Operasional Bank Karangkaaja	Risiko Operasional Bank Karangkaaja	Risiko Operasional Bank Karangkaaja
	2	Analisa Risiko Operasional Bank Karangkaaja	Risiko Operasional Bank Karangkaaja	Risiko Operasional Bank Karangkaaja
	3	Analisa Risiko Operasional Bank Karangkaaja	Risiko Operasional Bank Karangkaaja	Risiko Operasional Bank Karangkaaja
	4	Analisa Risiko Operasional Bank Karangkaaja	Risiko Operasional Bank Karangkaaja	Risiko Operasional Bank Karangkaaja
	5	Analisa Risiko Operasional Bank Karangkaaja	Risiko Operasional Bank Karangkaaja	Risiko Operasional Bank Karangkaaja
	6	Analisa Risiko Operasional Bank Karangkaaja	Risiko Operasional Bank Karangkaaja	Risiko Operasional Bank Karangkaaja
	7	Analisa Risiko Operasional Bank Karangkaaja	Risiko Operasional Bank Karangkaaja	Risiko Operasional Bank Karangkaaja
	8	Analisa Risiko Operasional Bank Karangkaaja	Risiko Operasional Bank Karangkaaja	Risiko Operasional Bank Karangkaaja
	9	Analisa Risiko Operasional Bank Karangkaaja	Risiko Operasional Bank Karangkaaja	Risiko Operasional Bank Karangkaaja
	10	Analisa Risiko Operasional Bank Karangkaaja	Risiko Operasional Bank Karangkaaja	Risiko Operasional Bank Karangkaaja
	1	Analisa Risiko Operasional Bank Karangkaaja	Risiko Operasional Bank Karangkaaja	Risiko Operasional Bank Karangkaaja
	2	Analisa Risiko Operasional Bank Karangkaaja	Risiko Operasional Bank Karangkaaja	Risiko Operasional Bank Karangkaaja
	1	Analisa Risiko Operasional Bank Karangkaaja	Risiko Operasional Bank Karangkaaja	Risiko Operasional Bank Karangkaaja
	2	Analisa Risiko Operasional Bank Karangkaaja	Risiko Operasional Bank Karangkaaja	Risiko Operasional Bank Karangkaaja

PROGRAM DILAKUKAN PADA TAHUN 2001
SENTRAL BANK INDONESIA DAN BERSAMA-SAMA DILAKUKAN
MANAJEMEN RISIKO BANK KARANGKAJA

No.	Kode	Kegiatan	Periode	Kontrol
	1	Analisa Risiko Operasional Bank Karangkaaja	01-01-2001-01-01-2002	Risiko Operasional Bank Karangkaaja
	2	Analisa Risiko Operasional Bank Karangkaaja	01-01-2001-01-01-2002	Risiko Operasional Bank Karangkaaja
		PERIODE	01-01-2001-01-01-2002	

Bogor, 18 Maret 2001

Pj. M. Amin
pewakilan SBN di Bank Karangkaaja

M. Sugiharto
pewakilan SBI di Bank Karangkaaja

S. H. M. Amin, M. Sc.
M. Sugiharto, M. Sc. MM



Lampiran 2. Pengukuran Kinerja 2021

PENGUKURAN KINERJA

1. PERANGKAT DAERAH : RSUD AM PARIKESIT
2. JABATAN : PEMERINTAH
3. TAHUN : 2021

NO	KEGIATAN KINERJA	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya Kinerja dan Konsistensi Perangkat Daerah	Persentase Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Hasil Pengelolaan BPN/ Implementasi pada Tahun Berjalan Bisa Wajib untuk dilaksanakan sesuai peraturan budi dan kebutuhan Persentase Konsistensi Kinerja antara hasil laporan Pengamanan Banteng Tahun	800 (77)	4.083.333	110,13%
		Persentase Implementasi Input Rencana Umum Pengelolaan pada Akhirnya SLEUP (Relevansi) 100% yang berdasarkan Penilaian kinerja Perangkat Daerah Tahun 2020 oleh Wakilnya 100% berjalan sejalan kesepakatan Banteng Tahun 2020 Tingkat Realisasi serta ketepatan LKAUP pertengggal 31 Maret 2021 Tingkat Realisasi LKAUP pertengggal 31 Maret 2021	100%	100%	100%
		Persentase Tingkat Kesiap Persiapkan Diri	Waktu 80 80 - 70	20,4	40,88%
2.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Kepuasan Pelayanan Publik (Pelayanan terhadap Kepuasan 100%)	Pelayanan Penuh (100%)	Pelayanan Penuh (100%)	100,74%
3.	Tercapainya Standar Wala Kunci Kunci	Persentase Realisasi UTM yang mencapai Target Peningkatan Pemakaian Sarana	80%	77,78%	91,03%
		Persentase (80)	Persentase (80,5-1)	Persentase (80,5-1)	80,38%

NO	KEGIATAN KINERJA	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4.	Meningkatnya Keterwujudan Kinerja Administrasi Kehutaniyah Daerah Berbasis Data dan Informasi sesuai dengan Prinsip Perangkat Daerah	Persentase keterwujudan kinerja administrasi berbasis yang strategis dan inovatif dalam bentuk dokumentasi tertulis 100%	100%	100%	100%
5.	Meningkatnya Anggaran Kepatuhan di Kehutaniyah Kudu Karangasem	Persentase Finansialisasi, Pengalihan, Pelaksanaan Program dan Kegiatan Berbasis pada Data Terpadu Kesejahteraan Banteng (DTKB)	100%	100%	100%

Tanggal: 25 Januari 2022
PP. Banteng

Dr. MARTINA SUJANINGTYAS, M.Kes
NIP. 19710710 200512 3 002





Lampiran 3. Indikator Kinerja Individu Direktur RSUD AM Parikesit

INDIKATOR KINERJA DIREKTUR	
1. Mengelola Organisasi	2.00.01.01 Kinerja Organisasi
2. Finansial	2.00.01.02 Kinerja Finansial
3. Kesehatan	3.00.01.01 Kinerja Kesehatan
4. Nonfinansial	4.00.01.01 Kinerja Nonfinansial

No.	KEGIATAN/KINERJA	PERIODISASI	FORMULASI KINERJA	STRATEGI KINERJA
1. Mengelola Organisasi (di bawahnya terdiri 20 Kinerja Organisasi yang diungkapkan dalam 12 Kinerja)	Penetapan Tujuan/Rencana kerja dan Implementasi	Catatan: Target = 100%	Implementasi Organisasi	
	Penilaian kinerja dan evaluasi hasil kerja	Catatan: Target = 100%	Evaluasi Organisasi	
	Pengembangan dan pelatihan karyawan	Catatan: Target = 100%	Pelatihan Organisasi	
	Pengembangan dan pengembangan teknologi dan sistem informasi kerja	Catatan: Target = 100%	Pengembangan Sistem Informasi Organisasi	
	Pengembangan dan pengembangan organisasi	Catatan: Target = 100%	Pengembangan Organisasi	
	Pengembangan dan pengembangan teknologi dan sistem informasi kerja	Catatan: Target = 100%	Pengembangan Sistem Informasi Organisasi	
	Pengembangan dan pengembangan teknologi dan sistem informasi kerja	Catatan: Target = 100%	Pengembangan Sistem Informasi Organisasi	
2. Nonfinansial Kinerja	Capaian Pendapatan Rumah Sakit	Catatan: Target = 100%	Target Pendapatan	
3. Kesehatan	Penilaian kinerja dan evaluasi hasil kerja	Catatan: Target = 100%	Evaluasi Kinerja	
4. Kinerja Nonfinansial	Penilaian kinerja dan evaluasi hasil kerja	Catatan: Target = 100%	Evaluasi Kinerja	

No.	KEGIATAN/KINERJA	PERIODISASI	FORMULASI KINERJA	STRATEGI KINERJA
1. Mengelola Organisasi	Penilaian kinerja dan evaluasi hasil kerja	Catatan: Target = 100%	Evaluasi Organisasi	

Tangerang Selatan, 10 Februari 2021
PJ. Kepala



@. Heru Sulistiyo, S.Pd.I, M.Si, MM
NIP. 1973071020121107



Lampiran 4. Pohon Kinerja Tahun 2021

Case 1990		Case 1991		Case 1992		Case 1993		Case 1994		Case 1995	
Year	Month										
1990	January	1991	January	1992	January	1993	January	1994	January	1995	January
1990	February	1991	February	1992	February	1993	February	1994	February	1995	February
1990	March	1991	March	1992	March	1993	March	1994	March	1995	March
1990	April	1991	April	1992	April	1993	April	1994	April	1995	April
1990	May	1991	May	1992	May	1993	May	1994	May	1995	May
1990	June	1991	June	1992	June	1993	June	1994	June	1995	June
1990	July	1991	July	1992	July	1993	July	1994	July	1995	July
1990	August	1991	August	1992	August	1993	August	1994	August	1995	August
1990	September	1991	September	1992	September	1993	September	1994	September	1995	September
1990	October	1991	October	1992	October	1993	October	1994	October	1995	October
1990	November	1991	November	1992	November	1993	November	1994	November	1995	November
1990	December	1991	December	1992	December	1993	December	1994	December	1995	December



Lampiran 5. Rencana Aksi Tahun 2021

The screenshot shows a Microsoft Word document titled "Rencana Aksi Tahun 2021". The document contains several tables and sections. At the top, there is a table with columns for "Kegiatan", "Tujuan", "Indikator", "Penanggung Jawab", and "Waktu Pelaksanaan". Below this is a large table with multiple rows and columns, likely detailing specific actions and their details. The document is filled with text and some graphical elements like arrows.

Lampiran 6. Publikasi SAKIP pada aplikasi E-Sakip Kemenpan RB

The screenshot shows a computer screen displaying the E-Sakip application. On the left is a dark sidebar with a green header bar containing the text "E-Sakip Kemenpan RB". Below this are several menu items. The main area is titled "Laporan Kinerja". Underneath this, there is a sub-menu with the text "Laporan Kinerja". The main content area displays a table with several rows. Each row contains columns for "No", "Instansi", "Kegiatan", "Waktu", "Penanggung Jawab", and "Status". To the right of each row is a small orange square icon with a white number inside, ranging from 1 to 5. The table has a light gray background with alternating row colors.





Lampiran 7. Hasil Evaluasi AKIP RSUD AM Parikesit Tahun 2020

9. Hasil evaluasi atau implementasi Sistem AKIP pada RSUD AM Parikesit Kabupaten Kulon Progo tahun anggaran 2020 memperoleh nilai rata-rata 90,32 (Dikelompokkan Kategori Tinggi Dua) atau dengan prediksi penilaian = "A" (Mengaku). Penilaian tersebut menunjukkan Akuntabilitas Kinerja masih sangat baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk meningkatkan manajemen kinerja dan peningkatan pelayanan. Hal ini menjadikan hasilnya pembangunan bantuan kesejahteraan dan penyelenggaraan unsur pemerintahan yang berorientasi hasil di Perangkat Daerah masih memenuhi kriteria yang diharapkan.

Average rincian hasil evaluasi modul kategori sebagai berikut :

No.	Karakteristik Kompleksitas	Hasil Penilaian Kinerja			Pendekripsi Penilaian
		Nilai Penilaian Rata-rata	Waktu	Spesifikasi	
		%	Tanggal Batas	Ranah Kinerja	
1.	PERENCANAAN KINERJA	90	100%	90,32	(0,97)
2.	PENGETAHUAN KINERJA	25	30,31	30	(0,71)
3.	PELAPORAN KINERJA	15	11,11	12,3%	(0,15)
4.	EVALUASI INTERNAL	10	7,14	6,17	(0,70)
5.	CAPACITAS KINERJA	50	24,38	24,38	-
Nilai Hasil Penilaian		100	81,83	81,83	Skor Maksimum
Tingkat Akurasi/Presisi Rata-rata			X	X	Hilangkan

Hasil evaluasi mendekati prediksi bahwa sistem unsur bantuan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kinerja tetapi akhirnya menunjukkan hasilnya bantuan kinerja adalah memperoleh interpretasi "A" (Mengaku); dalam perspektif sistem akuntabilitas kinerja unsur penyelenggaraan pemerintahan di RSUD AM/Parikesit Kabupaten Kulon Progo diberikan dengan telus yang baik.





Lampiran 2. Aset Tanah

No.	Name		Address		Phone		Email		Date		Status	
	First Name	Last Name	Street	City	Area Code	Number	Primary	Secondary	Month	Year	Active	Inactive
1	John	Doe	123 Main St	Anytown	(555)	12345678	Yes	No	January	2023	Active	Inactive
2	Jane	Doe	456 Elm St	Anytown	(555)	987654321	No	Yes	February	2023	Inactive	Active
3	Bob	Smith	789 Oak St	Anytown	(555)	321654987	Yes	No	March	2023	Active	Inactive
4	Sarah	Jones	234 Pine St	Anytown	(555)	543216879	No	Yes	April	2023	Inactive	Active
5	David	Williams	567 Cedar St	Anytown	(555)	987654321	Yes	No	May	2023	Active	Inactive
6	Mary	Johnson	321 Birch St	Anytown	(555)	123456789	No	Yes	June	2023	Inactive	Active
7	Mike	Allen	654 Maple St	Anytown	(555)	876543210	Yes	No	July	2023	Active	Inactive
8	Linda	Miller	234 Spruce St	Anytown	(555)	543216879	No	Yes	August	2023	Inactive	Active
9	Steve	Wilson	789 Pine St	Anytown	(555)	987654321	Yes	No	September	2023	Active	Inactive
10	Emily	Anderson	456 Cedar St	Anytown	(555)	123456789	No	Yes	October	2023	Inactive	Active
11	Mark	Howard	567 Birch St	Anytown	(555)	876543210	Yes	No	November	2023	Active	Inactive
12	Karen	Thompson	321 Spruce St	Anytown	(555)	543216879	No	Yes	December	2023	Inactive	Active

**GENERAL SECRETARIAT OF THE UNITED NATIONS
GENERAL SECRETARIAT**

A photograph of a white, rectangular, double-layered cake. The cake has a decorative border around the top edge. It is placed on a white surface.

Berita acara Asrama Imam Bonjol



Sertifikat Asrama Perawat Mayi. Paniaitan



Lampiran 8. Tingkat Kepatuhan LHKPN RSUD AM Parikesit Tahun 2021



Lampiran 9. Sertifikat Akreditasi RSUD AM Parikesit Tahun 2019-2022



Penghargaan/Sertifikat dengan Predikat **PARIPURNA** dari Badan Independen Non Kementerian Komisi Akreditasi Rumah Sakit tahun 2020-2022



Lampiran 10. Hasil Nilai dan Piagam Pelayanan Publik dari Kemenpan RB

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DAN REFORMASI BUMN
REPUBLIK INDONESIA**

Surat Edaran Dikdasmen No. 001/P/2010/DR/2010 - Pengumuman Penilaian
Kinerja Organisasi Pendidikan Tinggi
Tahun 2010

**Berita
Lampiran
No:** SE-DIK/001/2010
1. Judul Surat
Pengumuman Hasil Kinerja
Penilaian Organisasi Pendidikan Tinggi
Tahun 2010

(22 Januari 2010)

10.
Bapak Pakuanus Iliau Kartikastra

11.
Terima

Bencana di Aceh akhirnya juga berdampak kepada kinerja seluruh unit KEMENKIN 2010. Namun demikian, Penilaian Organisasi Pendidikan Tinggi dan Reformasi BUMN masih dilaksanakan sebagaimana perintahnya agar tetap berjalan pada tahap Penilaian Kinerja Organisasi Pendidikan Tinggi yang dilaksanakan bersama-sama dengan penilaian kinerja seluruh satuan kerja di lingkungan KEMENKIN.

No	Golongan Organisasi	Nilai Kinerja	Kategori
1	Unit Pengembangan Sumber dan Penelitian Kemendiknas (Selain CIPD/PT)	4,80	A
2	Unit Kependidikan dan Penelitian Riset Dikti/Kemendiknas	3,60	B
3	Unit Pengembangan Sumber dan Penelitian Kemendiknas	4,00	A
	Hasil Rata-Rata Penilaian	4,00	B

Kategori penilaian meliputi nilai hasil kinerja penilaian organisasi pada tahap penilaian kinerja Organisasi Pendidikan Tinggi dan Reformasi BUMN. Hasil penilaian ini mencantumkan penilaian yang baik hasil kinerja organisasi kualitas penilaian organisasi menyajikan public performance.

Hasil penilaian dan kinerja Unit kerja yang tercantum diatas.

Dapat Bantuan Penilaian Pendidikan


Dr. H. Syamsuddin, M.Pd.

Terdapat:
 1. Beranda Pendidikan
 2. Hasil CIPD tidak yang dikenal
 3. Pengembangan penilaian



Penghargaan dari Kemenpan-RB sebagai Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik dengan meraih Kategori **Pelayanan Prima**



Lampiran 11. Hasil Standar Pelayanan Minimal dari Tahun 2018-2021

NO	JENIS LAYANAN	INDIKATOR	STANDAR MINIMAL	HASIL CAPAIAN				KETERANGAN (Tahun 2021)
				2018	2019	2020	2021	
1	Instalasi Rawat Darurat	Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa	100%	100	100	100	100	Tercapai
		Jam buka pelayanan gawat darurat	24 jam	24	24	24	24	Tercapai
		Pemberi pelayanan kegawat darurat yang bersertifikat BLS/PPGD/GELS/ALS	100%	100	100	80,08	62,17	Belum Tercapai
		Ketersediaan tim penanggulangan bencana	1 Tim	1	1	1	1	Tercapai
		Waktu tanggap pelayanan Dokter di Gawat Darurat	≤ 5 menit	4,64	3	2	1	Tercapai
		Kepuasan pelanggan pada Gawat Darurat	≥ 70 %	77,36	76	77,69	83,21	Tercapai
		Kematian pasien kematian < 24 jam di Gawat Darurat	≤ 2 per seribu (pindah ke pelayanan rawat inap setelah 8 jam)/‰	1,41	3,03	9,45	13,04	Belum Tercapai
2	Pelayanan Rawat Jalan	Tidak adanya keharusan untuk membayar uang muka	100%	100	100	100	100	Tercapai
		Pemberi pelayanan di klinik spesialis	100 % Dokter Spesialis	100	100	100	100	Tercapai
		Ketersediaan pelayanan rawat jalan	Min Kes. Anak, Penyakit dalam, Kebidanan dan bedah	100	100	100	100	Tercapai
		Buka pelayanan sesuai ketentuan	100%	93	95	92,52	92,42	Belum Tercapai
		Waktu tunggu di rawat jalan	≤ 60 menit	99	104	98	89	Belum Tercapai
		Kepuasan pelanggan di rawat jalan	≥ 90 %	80,38	83	85,60	88,15	Belum Tercapai
		a. Penegakan Diagnosis melalui pemeriksaan mikroskopis TB	≥ 60 %	76	43	29,91	49,22	Belum Tercapai
3	Pelayanan Rawat Inap	b. Kegiatan Pencatatan dan Pelaporan TB di RS	≤ 60 %	100	100	100	100	Tercapai
		Pemberi pelayanan rawat inap	dr. Spesialis, Perawat Min. pendidikan D3	100	100	100	100	Tercapai
		Dokter penanggung jawab pasien (DPJP) rawat inap	100%	100	100	100	100	Tercapai
		Ketersediaan pelayanan rawat inap	a. Anak b. Penyakit Dalam c. Kebidanan d. Bedah	100	100	100	100	Tercapai
		Jam visite dokter spesialis	100%	56,90	65	72,39	77,53	Belum Tercapai
		Kejadian infeksi pasca operasi	≤ 1,5 %	0	0	0	0	Tercapai
		Angka kejadian infeksi nasocomial	≤ 1,5 %	6,24	2,00	2,18	1,86	Belum Tercapai
4	Bedah Sentral	Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/kematian	100%	100	100	100	100	Tercapai
		Kematian pasien > 48 jam	≤ 25 per mill (%)	15,05	13,71	26,13	23,47	Tercapai
		Kejadian pulang paksa	≤ 5 %	3,14	2,86	2,85	2,46	Tercapai
		Kepuasan pasien rawat inap	≥ 90 %	83,49	84,56	85,53	87,11	Belum Tercapai
		a. Penegakan Diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB	≥ 60 %	65,00	82,83	48,66	28,57	Belum Tercapai
		b. Kegiatan Pencatatan dan Pelaporan TB di RS	≥ 60 %	100	100	100	100	Tercapai
		Waktu tunggu operasi elektif	≤ 2 hari	1	1	1	1	Tercapai
5	Persalinan, Perinatalogi Dan KB	Kejadian kematian di meja operasi	≤ 1 %	0	0	0	0	Tercapai
		Tidak adanya kejadian operasi salah sisi	100%	100	100	100	100	Tercapai
		Tidak adanya kejadian operasi salah orang	100%	100	100	100	100	Tercapai
		Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi	100%	100	100	100	100	Tercapai
		Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing pada tubuh pasien setelah operasi	100%	100	100	100	100	Tercapai
		Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi, dan salah penempatan endotracheal tube	≤ 6 %	0	0	0	0	Tercapai
		Kejadian kematian ibu karena persalinan	Perdarahan ≤ 1% Pre-eklampsia ≤ 30% Sepsis ≤ 0,2%	1,17 0 0	1,67 0,44 0	0 1,32 0	1 0,70 0,00	Tercapai





NO	JENIS LAYANAN	INDIKATOR	STANDAR MINIMAL	HASIL CAPAIAN				KETERANGAN (Tahun 2021)
				2018	2019	2020	2021	
		Pemberi pelayanan persalinan normal (dr. Sp.OG, dr. Umum, bidan)	a. Dokter Sp.OG b. Dokter Umum terlatih (Asuhan Persalinan Normal)	100	100	100	100	Tercapai
		Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit (Tim PONEX)	Tim PONEX yang terlatih	100	100	100	100	Tercapai
		Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi	Dokter Sp.OG Dokter Sp.A Dokter Sp.An	98 97 84	91	93,96	98,42	Belum Tercapai
		Kemampuan menangani BBLR 1500 gr – 2500 gr	100%	95	92,45	99,43	100	Tercapai
		Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria	≤ 20%	41,48	37,11	42,97	46,71	Belum Tercapai
		Keluarga Berencana a. Keluarga Berencana b. Konseling KB Mantap c. Gakin KB Pembayaran 100%	100%	100	100	100	100	Tercapai
		Kepuasan pelanggan	≥ 80%	89,87	82,89	83,74	84,31	Tercapai
6	Pelayanan Intensif	Rata-rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam	≤ 3 %	0	0	0,17	0,00	Tercapai
		Pemberi pelayanan unit intensif	100 % dokter Sp. Anestesi	100	100	100	100	Tercapai
			50 % perawat D3, D4, perawat mahir	31	58	52,77	34,61	Belum Tercapai
7	Radiologi	Waktu tunggu hasil pelayanan thoraks foto	≤ 3 jam (180 menit)	90	60	74	71	Tercapai
		Pelaksana ekspertise hasil pemeriksaan	IGD :100 % IRJA :100 % IRNA : 100 %	48 92 86	76,55 95,54 90,87	98,11 92,77 96,44	100 100 100	Tercapai Tercapai Tercapai
		Kejadian kegagalan pelayanan rontgen	≤ 2 %	0,85	0,34	0,12	0,51	Tercapai
		Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	82,97	83,83	83,41	83	Tercapai
8	Laboratorium Patologi Klinik	Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium	≤ 140 menit	107	101	95	101	Tercapai
		Pelaksana ekspertise hasil pemeriksaan laboratorium	100%	100	100	100	100	Tercapai
		Tidak adanya kesalahan penyerahan hasil	100%	100	100	100	100	Tercapai
		Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	85,66	85,79	91,92	91,40	Tercapai
9	Rehabilitasi Medik	Kejadian drop out pasien terhadap pelayanan rehabilitasi yang direncanakan	≤ 50 %	0	0	0	0	Tercapai
		Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan	100%	100	100	100	100	Tercapai
		Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	88,41	86,35	87,34	87,26	Tercapai
10	Farmasi	Waktu tunggu pelayanan obat jadi	≤ 30 menit	17	34	21	21	Tercapai
		Waktu tunggu pelayanan obat racikan	≤ 60 menit	33	52	35	33	Tercapai
		Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat	100%	100	99,99	100	0	Tercapai
		Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	81,07	79,46	79,65	80,73	Tercapai
		Penulisan resep sesuai formularium	100%	99	100	99,96	99,95	Belum Tercapai
11	Gizi	Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien	≥ 90 %	96	97	97,68	93,50	Tercapai
		Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien	≤ 20 %	12,14	10	7,59	6,24	Tercapai
		Tidak adanya kesalahan dalam pemberian diet	100%	100	100	100	99,75	Belum Tercapai
12	Transfusi Darah	Pemenuhan kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi	100%	-	-	100	100	Tercapai
		Kejadian reaksi transfusi	≤ 0,01 %	-	-	1,01	1,13	Belum Tercapai
13	Rekam Medik	Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	100%	87,62	79,93	97,82	98,67	Belum Tercapai
		Kelengkapan informed consent setelah mendapatkan informasi yang jelas	100%	45,52	50,27	29,94	37,90	Belum Tercapai





NO	JENIS LAYANAN	INDIKATOR	STANDAR MINIMAL	HASIL CAPAIAN				KETERANGAN (Tahun 2021)
				2018	2019	2020	2021	
		Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan	≤ 10 menit	10	24	7	7	Tercapai
		Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap	≤ 15 menit	29	8	6	5	Tercapai
14	Pengelolaan Limbah	Baku mutu limbah cair a. BOD< 30 mg/l	< 30 mg/l	14,35	9,14	39,89	14,68	Tercapai
		b. COD<80mg/l	< 80 mg/l	48,33	49,62	81,05	45,84	Tercapai
		c. TSS<30mg/l	< 30 mg/l	13,02	9,08	8,53	7,52	Tercapai
		d. PH 6-9	PH 6 – 9	7,64	7,51	6,55	6,75	Tercapai
		Pengelolaan limbah padat berbahaya sesuai dengan aturan	100 %	100	100	100	80,23	Belum Tercapai
15	Administrasi / Manajemen	Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan tingkat direksi	100 %	100	100	100	100	Tercapai
		Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja	100 %	100	100	100	100	Tercapai
		Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	100 %	100	100	100	100	Tercapai
		Ketepatan waktu pengurusan kenaikan gaji berkala	100 %	100	100	100	100	Tercapai
		Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam/tahun	≥ 60 %	45	73	16,96	49,25	Belum Tercapai
		<i>Cost recovery</i>	≥ 40 %	67,78	73,77	64,77	148,88	Tercapai
		Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	100 %	100	100	100	100	Tercapai
		Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap	≤ 2 jam	0	0	0	0	Belum Tercapai
		Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu	100 %	100	100	100	100	Tercapai
16	Ambulance / Kereta Jenazah	Waktu pelayanan ambulance/kereta jenazah	24 jam	24	24	24	24	Tercapai
		Kecepatan memberikan pelayanan ambulance/kereta jenazah di RS	≤ 30 menit	100	100	100	100	Tercapai
		Respon time pelayanan ambulance oleh masyarakat yang membutuhkan (sesuai kebutuhan berlaku)	≤ 30 menit	12	5	6	4	Tercapai
17	Pemulasaran Jenazah	Waktu tanggap pelayanan pemulasaran jenazah	≤ 120 menit	12	6	6	6	Tercapai
18	Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit	Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat	≥ 80 %	89,49	89,44	83,31	89,88	Tercapai
		Ketepatan waktu pemeliharaan alat	100%	90,84 71,03	99,77 91,31	100 84,75	93,62 99,89	Belum Tercapai Belum Tercapai
		Peralatan laboratorium (dan alat ukur yang lain) yang terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi	100%	98,86	100	93,31	100	Tercapai
19	Pelayanan Laundry	Tidak adanya kejadian linen yang hilang	100%	100	100	100	100	Tercapai
		Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap	100%	100	100	99,77	99,68	Belum Tercapai
20	Pencegahan dan Pengendalian Infeksi	Ada anggota Tim Pencegahan Penanggulangan Infeksi	75%	52	61,38	54,84	100	Tercapai
		Tersedia APD di setiap instalasi/ departemen	60%	100	100	100	100	Tercapai
		Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial / HAI (Health Care Associated Infection) di RS (min 1 paramete)	75%	100	100	100	100	Tercapai
Indikator Tercapai				77,78	75,76	70,71	75,76	





Lampiran 12. Evaluasi Kinerja Fisik dan Keuangan Triwulan Pertama Tahun 2021

Wolfram Density Plot

4

Lampiran 13. Evaluasi Kinerja Fisik dan Keuangan Triwulan Kedua Tahun 2021

卷之三

4



Lampiran 14. Evaluasi Kinerja Fisik dan Keuangan Triwulan Ketiga Tahun 2021

[View Details](#)



Lampiran 15. Evaluasi Kinerja Fisik dan Keuangan Triwulan Keempat Tahun 2021

ANSWER
P-000010

www.elsevier.com/locate/jbi

Microsoft Word - Microsoft Word



Lampiran 16. Evaluasi Kinerja Fisik dan Keuangan berdasarkan Aplikasi E-Pantau Bappeda Triwulan Pertama Tahun 2021





Lampiran 17. Evaluasi Kinerja Fisik dan Keuangan berdasarkan Aplikasi E-Pantau
Bappeda Triwulan Kedua Tahun 2021





Lampiran 18. Evaluasi Kinerja Fisik dan Keuangan berdasarkan Aplikasi E-Pantau
Bappeda Triwulan Ketiga Tahun 2021





Lampiran 19. Evaluasi Kinerja Fisik dan Keuangan berdasarkan Aplikasi E-Pantau
Bappeda Triwulan Keempat Tahun 2021





Jl. Ratu Agung No. 1 Tenggarong Seberang
Kutai Kartanegara - Kalimantan Timur
Telp. 0541 - 661015

evapor.parikesit@gmail.com
www.rsamp.kukarkab.go.id



RSUD A.M. Parikesit



@rsuparikesit



@rsamp.id



RSUD A M. PARIKESIT